



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI
PERDAGANGAN RI, MENTERI LUAR NEGERI RI, DAN MENTERI HUKUM
DAN HAM RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : ...
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Senin, 22 Maret 2021
- Waktu : 09.40 s.d. 13.21 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A. / Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
42 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Surya Sulisto
 3. Darmadi Durianto
 4. Rieke Diah Pitaloka
 5. ST. Ananta Wahana, S.H.
 6. Sonny T. Danaparamita
 7. I Nyoman Parta, S.H.
 8. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 10. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Ir. H. Mohamad Idris Laena

3. Drs. Mukhtarudin
4. Lamhot Sinaga
5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
6. Doni Akbar, S.E.
7. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

6 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh
6. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 5 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Subardi, S.H., M.H
3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S.
2. Tommy Kurniawan
3. Marwan Ja'far
4. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli
3. Putu Supadma Rudana

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina
2. Mahfudz Abdurrahman, S. Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Nasril Bahar, S.E.
3. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN

1. DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI,
2. MENTERI LUAR NEGERI RI,
3. MENTERI HUKUM DAN HAM RI

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Selamat pagi.

Assalamualaikum.

Bisa dimulai ya. Tumben ini mitra-mitranya sudah rapi semua. Jadi, kita harus segera dimulai.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera buat kita semua,

Syalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya,

Salam kebajikan,

Selamat datang kami ucapkan kepada pemerintah yang diwakili oleh:

Yang terhormat Menteri Perdagangan RI, Bapak Muhammad Lutfi,

Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak Jerry Sambuaga,

Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bapak Dahana Putra,

Ketua kelompok perundingan *Comprehensive Economic Partnership Between dari Public of Indonesia and the EFTA States*, Bapak Sumadi Brotodiningrat, selamat datang beserta jajarannya, dan

Bapak Ibu pimpinan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sehubungan dengan kondisi yang kita alami pada hari ini, pada saat ini yaitu terkait dengan penyebaran virus Covid. Rapat-rapat dilakukan oleh alat kelengkapan dewan dengan mitra pemerintah dan dilakukannya, ya ini sudah

biasa semua ya, virtual dan fisik dan virtual dengan ketentuan-ketentuan yang saya rasa sudah paham semua.

Bapak Ibu yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI, **rapat kerja** pada hari ini telah dihadiri. Ini lupa **di-silent**.

Rapat **kerja** hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 22 orang dari 9 **fraksi**. Sehingga dengan demikian, telah kuorum sesuai dengan Pasal 251 Ayat 1 **Peraturan DPRRI tentang Tata Tertib**. Oleh karena itu, dengan ini kami mengucapkan, "*Bismillahirrahmanirrahim*" izinkan rapat ini saya buka dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Dapat disetujui ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 09.40 WIB)

Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Rapat **Kerja** Komisi VI dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1, pembahasan terhadap RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* yaitu, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Selanjutnya, kami dapat sampaikan bahwa:

1. Presiden telah mengirimkan nomor, telah mengirimkan surat Nomor R25/press06 2019 tanggal 10 Juni 2019 mengenai rencana pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and the EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA kepada DPRRI.

Selanjutnya, dalam konsultasi pengganti rapat Bamus DPRRI antara pimpinan DPRRI dan pimpinan **fraksi** tanggal 27 Juni 2019, melalui surat Nomor PW09791 DPRRI 6 2019, tanggal 27 Juni 2019, menugaskan Komisi VI DPRRI untuk membahas ratifikasi tersebut bersama pemerintah.

2. Menindaklanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan **fraksi** tersebut. Dalam rapat intern Komisi VI DPRRI tanggal 19 Agustus 2019 telah disampaikan bahwa Komisi VI DPRRI telah menerima penugasan ratifikasi tersebut.
3. Pada tanggal, pada Senin 18 November 2019, Komisi VI DPRRI melaksanakan Raker dengan pemerintah yaitu, Menteri Perdagangan dalam rangka persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* dan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dan rapat memutuskan pengesahan dilakukan dengan **undang-undang** dan akan dibahas pada masa persidangan berikutnya.
4. Tanggal 21 November 2019, Komisi VI DPRRI telah menyampaikan surat Nomor LG19327 DPRRI 11 2019 kepada pimpinan DPR

mengenai penyampaian laporan hasil rapat kerja tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Australia, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan negara-negara EFTA dan persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik dalam **raker** dengan pemerintah, diwakili oleh Menteri Perdagangan.

5. Tanggal 13 Desember 2019, Ketua DPRRI mengirimkan surat kepada Presiden RI Nomor PW20934 DPRRI 12 2019, perihal RUU dan naskah tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Australia, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia negara-negara EFTA dan persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik.
6. Tanggal 27 Januari 2020, Komisi VI DPRRI telah melaksanakan RDPU dengan pakar dan akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut yaitu, dengan satu, Profesor Doktor Huwala Adolf F.C.B., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dua, Rita Amalia S.H., M.A. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan tiga, Wahyuni Bahar S.H.,L.L.M. dari Kamar Dagang Indonesia.
7. Tanggal 30 Januari 2020, Komisi VI DPRRI melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah yaitu, Menteri Perdagangan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - i. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengkaji secara detail dan komprehensif terkait rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dan rencana pengesahan persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik meliputi hal-hal yang menguntungkan dan merugikan posisi Indonesia terkait implementasi perjanjian tersebut dan membahas kembali dengan Komisi VI DPRRI.
 - ii. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Perdagangan terkait persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dan persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka persiapan implementasi perjanjian tersebut dengan melakukan koordinasi dengan **kementerian** atau lembaga terkait.
8. Pada tanggal 19 Agustus 2020, Presiden RI telah mengirimkan surat kepada DPRRI yaitu, surat Nomor R36PRESS 08 2020, perihal RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Perdagangan untuk bersama-sama dengan DPRRI membahas RUU tersebut.
9. Tanggal 24 September 2020, surat Presiden tersebut selanjutnya telah dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan

Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi dan berdasarkan surat pimpinan DPRRI Nomor VW11558 DPRRI 9 2020 tanggal 24 September 2020, menugaskan Komisi VI DPRRI untuk membahas RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership between the Republic of Indonesia and The EFTA States* bersama-sama dengan pemerintah.

10. Pada hari ini Komisi VI DPRRI melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pembahasan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Australia.

Adapun agenda **raker** pada hari ini dibagi dalam dua sesi yaitu, sesi 1 penjelasan pemerintah, pandangan umum **fraksi-fraksi**, tanggapan, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum **fraksi-fraksi**, pembahasan materi DIM RUU dan DIM penjelasan.

Sesi 2, pendapat akhir **mini fraksi**, pendapat akhir pemerintah, pengambilan keputusan terhadap RUU dan penjelasan, penandatanganan naskah RUU dan penjelasan.

Mari kita mulai dengan sesi 1. Kami persilahkan yang terhormat pemerintah diwakili oleh Menteri Perdagangan untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership between the Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi koperasi, ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Kami persilakan, Pak Menteri. Sebentar Pak, ini biar kita cari sambungannya dulu.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Komisi VI yang terhormat,

Bapak Pimpinan sidang yang saya hormati,

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

Ibu Menteri Luar Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wamenlu Pak Mahendra Siregar; dan

Menteri Hukum dan HAM yang pada hari ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kelembagaan Pak Dahana yang saya hormati,

Chief Negosiator daripada EFTA *Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement*, Pak Sumadi Brotodiningrat,

Bapak Ibu Eselon 1 yang mendampingi kita pada, yang mendampingi kami pada hari ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada hari ini, untuk melakukan pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU tentang **Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi VI DPRRI yang telah mengundang kami untuk mendengarkan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia dan The EFTA States* atau **Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada presiden, kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2019. Diputuskan bahwa pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA dilakukan dengan **undang-undang**.

Pimpinan sidang,

Bapak Ketua dan Wakil Ketua, serta

Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat,

Sesuai ketentuan yang berlaku, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA pada tanggal 19 Agustus 2020.

Dalam surat tersebut, presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Perdagangan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili presiden dalam membahas RUU tersebut di DPRRI.

Pada kesempatan **ini**, perkenankanlah kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan keterangan pemerintah atas, atas Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Pimpinan sidang, Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **pemerintah** berusaha untuk memanfaatkan perdagangan internasional dengan bekerja sama dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan rakyat, khususnya di masa saat ini dunia sedang

menghadapi kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu, pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 pandemi Covid 19 menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia sekitar minus tiga setengah persen. Namun, IFF memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh lima setengah persen pada tahun 2021.

Pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan strategis dan *out of the box* untuk menghadapi tantangan Global yang penuh dengan ketidakpastian ini, serta mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid19, salah satunya melalui persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif, dalam konteks ini negara-negara EFTA yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss, merupakan **mitra** yang ideal untuk pembentukan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif karena beberapa hal, **di antaranya** yaitu:

Yang pertama, negara-negara tersebut merupakan pasar yang memiliki daya beli tinggi serta nilai penanaman modal yang besar. Namun, selama ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal atau *under capitalist*.

Yang kedua, komplementaritas di antara Indonesia dan EFTA baik di bidang barang, jasa, investasi. Sehingga, saling melengkapi bukan bersaing. Sebagai contoh, Indonesia mengeksport produk emas dan perhiasan, produk permesinan, bulldoser, mesin elektrik dan kimia organik. Sedangkan, Indonesia mengimpor produk **farmasi**, produk minyak dan minyak bumi, jam dan jam tangan dari EFTA.

Yang ketiga, negara-negara EFTA adalah tujuan ekspor potensial dan terus meningkat secara signifikan. Sebagai catatan bersama pada awal perundingan tahun 2011, Indonesia defisit dengan EFTA sebesar 677 Juta US Dollar. Namun, di tengah kondisi perekonomian Global yang sedang menurun akibat Covid19, IE-CEPA memberi indikasi yang sangat positif bagi ekspor Indonesia. Meskipun, IE-CEPA baru ditandatangani dan belum diimplementasikan nilai ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA telah meningkat secara sangat signifikan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 829,4 **juta US dollar** menjadi 2,4 **miliar** pada tahun 2020 untuk, atau meningkat sebesar 195,7% dengan surplus sebesar 1,6 **miliar US dollar**.

Pasca diimplementasikan, diimplementasikannya IE-CEPA, diharapkan Indonesia ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA akan terus mengalami kenaikan dengan signifikan.

Selain itu, perjanjian RI dengan EFTA ini menjadi perjanjian pertama kita di wilayah Eropa dan dapat menjadi batu loncatan menuju pasar Uni Eropa yang lebih luas sambil menunggu diselesaikannya perundingan Indonesia IE-CEPA yang sedang berlangsung.

Atas beberapa alasan ini, pemerintah melakukan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif bilateral dengan negara-negara EFTA yang juga, yang disebut juga dengan *Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IE-CEPA.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Persetujuan IE-CEPA telah memperoleh dukungan lintas **kementerian** dan lembaga serta para pemangku kepentingan yang lainnya. Bukan itu saja,

persetujuan ini juga merupakan persetujuan yang mendapatkan dukungan lintas pemerintahan. Proses negosiasi persetujuan ini dimulai sejak periode pemerintahan sebelumnya di tahun 2011 yang kemudian diselesaikan di era Bapak Presiden Joko Widodo hingga ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Indonesia untuk meningkatkan akses pasar dan daya saingnya di tingkat Global.

Salah satu makna simbolis dari persetujuan IE-CEPA yang perlu kami garis bawahi adalah bahwa IE-CEPA dapat meningkatkan profil produk minyak kelapa sawit Indonesia secara global. Sebagaimana dipahami bersama, produk andalan Indonesia ini menerima persepsi bahkan citra negatif di beberapa negara mitra termasuk Swiss.

Para Anggota Dewan pasti mengikuti dari dekat bahwa sejak Januari 2020 terdapat upaya melalui referendum untuk menolak persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan EFTA karena isu keberlanjutan atau *sustainability* minyak kelapa sawit Indonesia.

Pada tanggal 7 Maret 2021 diadakan sebuah *public vote* di Swiss yang syukur *alhamdulillah* hasilnya menggembirakan bagi Indonesia. Karena, mayoritas masyarakat Swiss tetap ingin meratifikasi persetujuan IE-CEPA dan pada saat yang sama mengkonfirmasi keberterimaan produk minyak kelapa sawit Indonesia sebagai produk yang berkelanjutan. Tentu saja hasil ini tidak lepas dari upaya-upaya diplomasi ekonomi dan dagang pemerintah RI baik di dalam negeri maupun di perwakilan untuk membela sawit yang telah menopang kehidupan jutaan petani Indonesia.

Ke depannya kita akan memastikan bahwa standar keberlanjutan untuk Kelapa Sawit Indonesia ISPO dapat diterima oleh Swiss dalam kerja, kerangka kerja sama yang ada dalam IE-CEPA.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat,

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing. Kami optimis dengan implementasi, diimplementasikannya IE-CEPA dan didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait penanaman modal, ketenagakerjaan serta dukungan kepada UMKM dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat menurun karena pandemi Covid 19.

Harapan kami selaku pemerintah adalah dengan diimplementasikannya persetujuan ini akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan juga termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses promosi penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia. Manfaat-manfaat ini diharapkan akan membantu transformasi Indonesia menjadi ekonomi maju yang dapat menghindari *middle income trap*.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat,

Rapat kerja pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA pada hari ini

tahapan, pada hari ini dan tahapan selanjutnya adalah sebuah awal suatu tonggak baru hubungan ekonomi Indonesia dengan EFTA.

Fungsi lembaga negara seperti DPRRI dan pemerintah adalah menjadi fasilitator para pelaku usaha yang menjadi mesin penggerak perekonomian nasional untuk menjalankan persetujuan ini ketika sudah disahkan dan berlaku.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Komisi VI DPRRI yang terhormat,

Demikian, keterangan pemerintah terhadap RUU ini. Kami berharap RUU ini dapat mendapatkan persetujuan bersama dari DPRRI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Akhir **kata**, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat atas dukungan dan kerja samanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta 'ala **Yang Maha Esa** senantiasa *meridhoi* segala pengabdian amal ibadah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan ini. Amin ya robbal alamin.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Tapi, ini kita mohon maaf mungkin di, kita mau ajukan untuk diskors dulu sebentar. Kita **pimpinan** dengan para Kapoksi ada yang harus dibahas mengenai *sequencing* dari pada proses pengesahan **undang-undang** ini. Jadi, kami skors 10 menit ya.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 10.02 WIB)

Baik, terima kasih untuk para Kapoksi mohon kita kumpul di ruang **pimpinan** ya. Apa boleh di sini malah, Pak.

Ya, baik Terima kasih skornya kami cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.12 WIB)

Tadi kita sudah punya satu kepehaman untuk kelanjutan dari pada **raker** ini supaya bisa efisien. Setelah penjelasan daripada pemerintah, kita lanjut dengan pembacaan, pandangan umum **fraksi**-fraksi dan untuk itu kita minta sesuai urutan saja.

Yang pertama pandangan umum dari Fraksi PDIP. Pandangan umum, Bu Sondang, silakan.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara

Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Dibacakan oleh Sondang Tiar Debora Tampubolon, Nomor Anggota A158.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syalom, Salam damai sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan,

Merdeka

Harus dibaca, Pak.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,

Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia,

Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,

Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dan melaksanakan rapat kerja pada hari yang berbahagia ini. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRRI untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang *pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA yang akan dibahas antara DPRRI dan pemerintah.

Saudara Menteri yang mewakili pemerintah,

Pimpinan sidang, dan

Para Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara dan bangsa ternyata juga memunculkan beragam persoalan **global** yang menuntut kepedulian perhatian dan penanganan bersama. Sebagai implementasi dari pemahaman tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati berbagai perjanjian internasional yang menyangkut persoalan-persoalan **global** yang diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan negara lain dalam upaya memenuhi kepentingan nasionalnya. Hubungan atau keterkaitan dengan negara lain dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya, melalui perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Namun begitu, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kita, perjanjian internasional berpedoman kepada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Untuk kepentingan inilah, maka pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang *Comprehensive Economic Partnership agreement between Republic of Indonesia and EFTA States* guna dibahas bersama DPRRI untuk dapat disahkan menjadi **undang-undang** yang akan mengikat secara hukum atau *legally banding*.

Perlunya pengusahaan dalam bentuk **undang-undang** terhadap persetujuan kemitraan antara pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara EFTA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2018, merupakan hasil kesepakatan antara DPRRI dengan pemerintah. Kemudian sesuai dengan substansi yang terkandung di dalam persetujuan tersebut, maka pembahasan **rancangan undang-undang** ini diserahkan kepada Komisi VI DPRRI yang salah satu bidang tugasnya adalah terkait dengan masalah perdagangan.

Saudara Menteri yang mewakili pemerintah, Pimpinan sidang, dan Para Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Dalam kehidupan bernegara, aspek perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung pembangunan nasional, pembangunan ekonomi nasional, Indonesia perlu membentuk persetujuan perdagangan internasional dengan negara-negara **mitra**. *European Free Trade Association* atau EFTA yang beranggotakan Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss merupakan salah satu kumpulan negara mitra dengan populasi konsumen yang memiliki daya beli tertinggi di dunia. Potensi pasar yang dimiliki oleh EFTA tersebut tentunya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor dari berbagai komoditas unggulan kita.

Selain itu, pemerintah Indonesia dapat mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing industri dalam negeri. Mengingat kemitraan ini diperkuat juga dengan kerja sama teknis di sejumlah sektor seperti, pertanian, perikanan, manufaktur dan transportasi.

Kemudian, Indonesia dan EFTA juga telah bersepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pengembangan kapasitas di sektor promosi, ekspor, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, hak kekayaan intelektual atau HAKI, kakao, kelapa sawit, pendidikan vokasional dan juga industri maritim. Jadi, selain berpotensi untuk meningkatkan volume ekspor, kemitraan ini juga berpotensi kuat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari sumber daya manusia kita.

Perlu dicatat juga bahwa pembahasan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia negara-negara EFTA tersebut telah melalui proses yang panjang. Persetujuan ini mulai diinisiasi pada tahun 2005 dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan *join* Indonesia EFTA *study group*, yang ditunjukkan untuk menilai kelayakan dari persetujuan perdagangan tersebut.

Dalam perjalanannya, negosiasi menuju persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA pertama kali diluncurkan pada tahun, pada Juli 2010 dengan putaran pertama yang diadakan pada awal 2011 di Indonesia dan sejak saat itu telah dilakukan 15 putaran negosiasi serta beberapa pertemuan ahli sebelum akhirnya ditandatangani pada tahun 2018 lalu.

Saudara Menteri, Pimpinan sidang, dan Para Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Beranjak dari pemahaman inilah, maka kita semua sepakat bahwa kerja sama di bidang perdagangan dengan negara lain termasuk dengan negara-negara EFTA merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan ekonomi ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Fraksi PDI Perjuangan DPRRI siap untuk membahas dan mendalami **rancangan undang-undang** ini bersama dengan **fraksi-fraksi** lain, demikian juga dengan pemerintah. Sebab, kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif ini perlu segera untuk dilakukan. Sehingga, dapat memberikan manfaat bagi peningkatan akses pasar, peningkatan akses pasar, barang dan jasa termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang, akses promosi dan proteksi penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia, serta dukungan-dukungan kuat bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syalom, Om Santi Santi Om.

Atas nama pimpinan **komisi**, atas nama **pimpinan** kelompok Komisi VI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRRI. Ketua Adisatrya Suryo Sulisto, ditandatangani A196.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Sondang. Kita lanjut dengan Fraksi Partai Golkar. Oleh Pak Mukhtaruddin, silakan Pak.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua,

Berikut kami sampaikan beberapa pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar terkait dengan pembahasan RUU tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Bapak Menteri Perdagangan yang kami hormati beserta Seluruh jajaran, dan Pak Wamen,

Wakil Menteri Luar Negeri yang juga hadir bersama jajaran, dan

**Yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Puji syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan tersimpan rahmat dan karunia dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam kesempatan ini dalam rangka kita pembahasan tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Pada prinsipnya, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tulus proaktif dalam proses perundingan-perundingan dagang dengan mitra-mitra strategis kita di dunia. Sebuah keniscayaan bahwa dalam dunia yang begitu sangat berubah dan dinamis, kita harus memenangkan kompetisi-kompetisi dagang yang tentu banyak yang berpihak dan menguntungkan kepada negara kita. Oleh karena itu maka, hal-hal perjanjian strategis yang selama ini telah dijalin dan ke depan tentu harus kita tingkatkan dengan prinsip bahwa perjanjian itu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara Indonesia.

Nah, kami pada prinsipnya menyambut baik tentang rencana kita untuk membahas dan akan mengesahkan tentang kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA ini. Oleh karena, negara-negara EFTA khususnya Eropa merupakan pasar strategis terhadap komoditas strategis kita, khususnya sawit dan produk-produk lain.

Oleh karena itu maka, perundingan ini menjadi sesuatu hal yang, perjanjian ini menjadi sesuatu hal yang penting dan strategis dalam rangka kita meningkatkan ekspor komoditas kita, khususnya komoditas andalan kita adalah kelapa sawit yang pada saat pandemi ini pun tidak, tidak terkontraksi dan bisa-bisa memenangkan persaingan **global** kita, bahkan ekspor kita dari komoditas ini menjadi tulang punggung kita dalam menghadapi krisis pada tahun-tahun 2020 dan yang akan datang.

Nah, oleh karena itu maka, kami pada prinsipnya dari Fraksi Partai Golkar akan siap untuk membahas bersama pemerintah dan **fraksi-fraksi** yang lain terhadap DIM yang telah diajukan dan ini merupakan suatu pekerjaan yang harus cepat kita laksanakan dan mudah-mudahan kita berharap proses ini bisa berjalan dan kita selesaikan pada hari ini.

Mengingat bahwa kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah Swiss ya dan negara Swiss yang telah melakukan memorandum dan hasil memorandum yang mendukung terhadap terlaksanakannya untuk ratifikasi dapat perjanjian dagang.

Oleh karena itu, maka, Indonesia harus proaktif dan cepat untuk menanggapi ini. Karena, ini adalah bisnis, ini adalah dagang. Dagang itu momentum, momentum ini tidak boleh kita lewatkan dan harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita.

Hal-hal menyangkut pendapat lain-lain akan kami sampaikan secara lebih lengkap dalam pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya.

Terima kasih perhatian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Ini mendukung juga. Kita lanjut dengan Gerindra, silakan.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B. Bus., M.M., MBA.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera, Syalom,

Om Swastiastu, Namo buddhaya,

Salam Indonesia Raya,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,

Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia,

Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang hadir pada pagi hari ini selaku Wakil Pemerintah, serta

Seluruh hadirin yang berbahagia termasuk perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, dan juga

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hadir pada pagi hari ini.

Di hari yang penting ini marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala*, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan tugas negara yang diberikan kepada kita sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pandemi Covid 19 telah memukul seluruh negara di dunia tak terkecuali negara-negara anggota EFTA seperti, Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan juga Swiss serta negara mitranya. Keempat negara tersebut merupakan pasar yang besar sebanding dengan pasar Australia atau Korea Selatan dan memegang peran signifikan dalam ekonomi internasional, baik sebagai mitra perdagangan maupun mitra investasi. Konsumen di negara-negara EFTA adalah salah satu dengan daya beli tertinggi di dunia yang membuat pasar EFTA sangat menarik.

EFTA memiliki salah satu jaringan perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang paling luas di dunia. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat mendorong meningkatkan perdagangan dan investasi dengan memberikan dunia usaha suatu kerangka yang terbuka, dapat diprediksi dan kepastian hukum. Jaringan perjanjian EFTA juga memungkinkan pemerintah dan otoritas untuk memperkuat hubungan bilateral antara negara-negara terkait.

Negara-negara EFTA memiliki reputasi sebagai mitra perdagangan bebas yang pragmatis dan berorientasi solusi atau *solution oriented*. Untuk itu, menyelesaikan perundingan perdagangan internasional menjadi perhatian khusus pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan juga negara-negara *European Free Trade Association* atau EFTA.

Demikian beberapa catatan yang perlu diperhatikan dengan seksama dalam pandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, kita lanjut dengan Fraksi Nasdem. Bapak Rapsel Ali, silakan Pak.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih.

Pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPRRI terhadap pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Indonesia and THE EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara EFTA. Disampaikan oleh Rapsel Ali A396.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Syalom, Salam sejahtera,

Om Santi Santi om, Namu buddhaya,

Salam kebajikan dan salam restorasi.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI DPRRI,

Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPRRI,

Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajaran,

Saudara Menteri Luar Negeri serta jajaran, dan

Saudara Menteri Perdagangan,

Menteri Luar Negeri, dan

Menteri Kumham beserta segenap jajarannya, serta

Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan **perkenaan-Nya** pada

hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem.

Indonesia EFTA Economic Partnership Agreement IE-CEPA, merupakan satu di antara bentuk kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia. IE-CEPA ini menjadi spesial bagi negara Indonesia, dikarenakan kerja sama ini menjadi tonggak sejarah. Pertama, Indonesia dengan negara-negara benua Eropa. Negara Eropa tersebut **di antaranya** Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss yang merupakan **mitra** perdagangan dengan reputasi sebagai penanam modal jangka panjang yang terpercaya.

Selain itu, negara-negara tersebut merupakan pasar besar dengan daya beli tinggi serta nilai penanaman modal asing yang tinggi. Dengan adanya persetujuan perdagangan IE-CEPA ini, Indonesia memperoleh manfaat berupa akses pasar barang jasa, penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, program kerja sama ekonomi dan fasilitasi perdagangan. Tetapi, keuntungan tersebut harus dibarengi dengan kemampuan, *capability*, kualitas dan jumlah yang memadai. Hal ini penting untuk saling menghargai atau *mutual respect*, semangat yang konstruktif ataupun kesetaraan kedaulatan dan saling menguntungkan, *common benefit*.

Dengan pengakuan pada perbedaan tingkat pembangunan para pihak, jika tidak demikian tentunya Indonesia hanya akan menjadi ladang pasar bagi negara lain dan ini tentu sangat merugikan diri sendiri sebagai bangsa. Mengingat jumlah penduduk EFTA yang di bawah 15 **juta** jiwa, jika dibandingkan dengan Indonesia yang berjumlah 270 **juta** jiwa, ini menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi negara lain. Indonesia memiliki produk unggulan dan jumlahnya melimpah. Tetapi, mengalami hambatan di negara Eropa seperti CPO. Oleh karenanya, IE-CEPA ini dapat menjadi solusi untuk terbukanya kembali pasar produksi Indonesia di Eropa, terutama CPO.

Hal lain yang diharapkan dari IE-CEPA ini juga dapat mengurangi tekanan-tekanan internasional terhadap kebijakan nikel Indonesia dalam perdagangan Indonesia.

Pimpinan Komisi VI DPRRI,

Bapak Anggota Komisi VI DPRRI yang saya banggakan,

Kita harus memberikan jaminan masa depan yang lebih baik bagi penerus bangsa ini. Kesepakatan IE-CEPA ini harus menjamin dan tidak ada nilai tawar lagi. Sehingga, kita akan dengan bangga meninggalkan warisan bagi mereka dan tercatat dalam sejarah adalah bagian yang berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsa ini.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Nasdem DPRRI terhadap pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita secara baik-baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera, Om Santi Santi om, Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan salam restorasi,
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Kita lanjut dengan Fraksi Partai PKB yang dibacakan oleh Bapak Tommy, silakan Pak Tommy.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRRI tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Tommy Kurniawan nomor Anggota A11.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat pimpinan Komisi VI beserta dengan seluruh Anggota Komisi VI DPRRI,

Yang kami hormati Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran,

Yang saya hormati Saudara Menteri Luar Negeri,

Yang saya hormati Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran, serta

Hadirin yang berbahagia,

Alhamdulillah kesempatan berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka mendengarkan penyampaian pandangan Fraksi terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang **Kemitraan Ekonomi Komprehensif** Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Shalawat serta salam tidak lupa kita *haturkan* kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan ilmu dan contoh dalam mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga, kita menjadikannya teladan dan bekerja demi terwujudnya peradaban Indonesia yang *baldatun, toyyibatun, warobbun ghofur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang **Kemitraan Ekonomi Komprehensif** Indonesia dengan negara-negara EFTA ini.

**Saudara Pimpinan sidang,
Anggota Dewan,
Menteri Perdagangan,
Menteri Luar Negeri, dan
Menteri Hukum dan HAM, serta
Hadirin yang terhormat,**

Mengawali penyampaian ini, izinkan kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Komisi VI DPRRI yang melakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang **Kemitraan Ekonomi Komprehensif** Indonesia dengan negara-negara EFTA dengan sungguh-sungguh.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa perjanjian kerja sama perdagangan antara negara memberi peluang untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar, baik berupa ekspor maupun impor, berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA akan dapat menguntungkan Indonesia. Penguatan kerja sama **antar negara** dapat membuat akses pasar semakin terbuka, terutama dengan adanya peningkatan perdagangan dan juga investasi.

**Saudara Pimpinan sidang,
Anggota Dewan,
Menteri Perdagangan,
Menteri Luar Negeri, dan
Menteri Hukum dan HAM, serta
Hadirin yang terhormat**

Kami meyakini adanya dampak positif diberlakukannya kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA. Namun, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan sebagai bahan pemikiran bersama.

Satu, Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama yang dibuat antara Indonesia dengan negara-negara EFTA dapat membuka peluang pasar dan peningkatan daya saing produk-produk dari Indonesia.

Yang kedua, negara-negara dikenal sebagai investor penting untuk sumber penanaman modal asing ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. FDI, *Foreign Direct Investment* dari negara-negara EFTA dikenal kuat terutama di sektor keuangan dan perbankan dalam komunikasi, farmasi, kimia dan plastik, ekstrasi penambangan dan migas.

Kami mengharapkan pemerintah mampu menangkap peluang-peluang di sektor tersebut untuk peningkatan perekonomian Indonesia.

Kami secara tegas meminta pemerintah memperkuat ekosistem industri di Indonesia. Hal ini kami rasa penting, sebab menurut data BPS (Badan

Pusat Statistik) hingga tahun 2020, surplus neraca perdagangan Indonesia dan negara-negara EFTA baru disumbang oleh Swiss. Sementara negara-negara lainnya, Norwegia, Islandia dan Liechtenstein masih mencatatkan defisit.

Yang keempat, kami meminta kepada pemerintah agar UMKM, kami ulangi, kami meminta kepada pemerintah agar UMKM dilibatkan dalam kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA. Kami ingin agar UMKM Indonesia bisa naik kelas dan berorientasi ekspor. Terbukanya kerja sama ini mesti kita lihat sebagai peluang yang mesti dimanfaatkan secara maksimal.

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, intinya kami mengapresiasi atas perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA ini. Atas perhatian Saudara Pimpinan, para Anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberi **petunjuk-Nya** untuk kita semuanya.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Kita lanjut Fraksi Partai Demokrat, Bapak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh Herman Khaeron nomor Anggota A544.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Yang terhormat Menteri, Menteri Perdagangan, beserta

Wakil Menteri Perdagangan, dan

Seluruh staf yang hadir,

Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Pak Wakil Menteri, dan dari

**Kementerian Hukum HAM, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Kemenkum HAM.**

Sesungguhnya dalam pandangan umum ini cukup Menteri Perdagangan, tapi karena ada percepatan, saya kira hal yang baik untuk kita semua.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap dapat melaksanakan tugas dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPRRI. Seperti yang kita ketahui negara-negara **(suara tidak jelas)** *Association* merupakan mitra perdagangan yang cukup penting bagi Indonesia. Bentuk hubungan ekonomi yang sudah terjalin diharapkan terus mengalami peningkatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembahasan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA telah melalui serangkaian proses yang panjang, tepatnya sejak tahun 2005. Pembahasan ini juga sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid 19. Akan tetapi, karena adanya komitmen kuat di antara pihak yang terlibat di dalamnya, maka proses pembahasan dan ratifikasi tersebut tetap dilanjutkan.

Yang terhormat Pimpinan, dan Seluruh Anggota Komisi VI,

Para Menteri atau yang mewakili presiden yang hadir pada rapat ini.

Terkait rencana ratifikasi komprehensif *Economic Partnership agreement between the Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA. Kami dari Fraksi Demokrat memberikan catatan sebagai berikut.

Satu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar rencana ratifikasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA harus memberikan hasil yang positif untuk implementasi program pemulihan ekonomi nasional, PEN di Indonesia pasca pandemik Covid 19.

Ini penting Pak Menteri, karena ini bisa menjadi jalan percepatan pemulihan pasca pandemik Covid 19.

Kedua, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar setiap bentuk kerja sama ekonomi komprehensif termasuk IE-CEPA harus mampu memberikan solusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global terutama pasca terjadinya Covid19. Mengingat Indonesia merupakan pasar potensial baik di tingkat kawasan maupun di tingkat Internasional. Fraksi Partai Demokrat berharap IE-CEPA dapat menciptakan rantai pasok Global yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar mencermati upaya optimalisasi pasar ekspor untuk mempertahankan tren positif neraca perdagangan dalam negeri. Karena, ratifikasi IE-CEPA akan memiliki banyak aspek yang berdampak langsung pada perekonomian Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan, perdagangan jasa dan investasi.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar dapat memastikan bahwa IE-CEPA dapat menjadi pintu masuk yang lebih luas bagi produk-produk UMKM Indonesia. Sekali lagi saya juga ingin *men highlight* bahwa dengan adanya IE-CEPA ini dapat menjadi pintu masuk yang lebih luas bagi produk-produk UMKM Indonesia ke benua Eropa. Pemerintah harus memperhitungkan skema implementasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan catatan tersebut di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas rencana ratifikasi IE-CEPA dengan skema, dengan skema **undang-undang** dan cara seksama dan komprehensif.

Demikian pendapat umum dari Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Dengan harapan pengesahan tersebut tidak mengganggu kedaulatan dan urusan domestik masing-masing negara, terutama setelah adanya dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian **global** akibat pandemik Covid 19. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat bersatu kita bangkit.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Maret 2021 Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia. Ketua Edhie Baskoro Yudhoyono A554, Sekretaris Marwan Cik Asan Anggota A535 ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Salam solid untuk Demokrat yang sah.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Salam solid dan berdaulat.

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjut dengan Ibu dari PKS, Fraksi PKS, Ibu Nevi ya, kayaknya *online*. Oke, anggotanya virtual. Ada Bu Nevi? Ya, silakan Bu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Iya, dengar suara saya, Pak?

Makasih, Pimpinan.

Pandangan Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (***suara tidak jelas***). Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan pemikiran ekonomi komprehensif antara **Republik** Indonesia dengan negara-negara EFTA, *Indonesian European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership agreement Indonesia*, Indonesia EFTA CEPA. Disampaikan oleh Hj. Nevi Zuairina Nomor Anggota A416.

Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama jajaran,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama jajaran,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama jajaran,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami muliakan.**

Wujud syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala* yang telah memberikan rahmat dan **nikmat-Nya** kepada kita, sehingga sampai saat ini masih dapat hadir dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Solawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI, Para Menteri, serta hadirin yang kami hormati.

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bangsa Indonesia saat ini telah melalui beberapa fase kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka tata kelola yang baik dan transparan di seluruh **lembaga-lembaga**, lembaga negara harus diterapkan.

Beberapa waktu yang lalu, Komisi VI melakukan serangkaian pembahasan mengenai rencana kerja sama kemitraan komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA, *European Free Trade Association*. Anggotanya terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swiss di bidang perdagangan barang, jasa, investasi serta kerja sama ekonomi.

Di era globalisasi di belakangan ini, kerja sama perdagangan **internasional** merupakan suatu keniscayaan. Negara-negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang dapat menyebabkan batas-batas kedaulatan ekonomi di suatu negara akan semakin hilang. Perekonomian di era globalisasi belakangan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat membuka peluang sebuah negara untuk menjual produk dalam negeri ke pasar internasional, tapi di sisi lain dapat membuka peluang membanjirnya produk-produk impor yang masuk ke dalam negeri.

Perdagangan internasional diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi keuangan negara maupun bagi kemakmuran rakyatnya. Di tengah kondisi Indonesia saat ini, di mana berdasarkan Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020, Indonesia mencatat surplus negara perdagangan sebesar 21,73 miliar US dollar, jauh lebih tinggi dari pencapaian pada periode yang sama pada tahun 2019 yang mengalami defisit 3,59 miliar US dollar.

Oleh karenanya, rencana kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan **persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara Indonesia dan EFTA *Indonesian European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* harus benar-benar dikaji dengan matang. Dengan harapan kerja sama kemitraan terjalin dapat memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan penggalian informasi yang telah kami peroleh. Maka, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama, **di antaranya** adalah aspek perlindungan industri dalam negeri dan aspek neraca perdagangan Indonesia terkait dengan rencana kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan EFTA.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI, Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA ini, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Sehingga, dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia.

Kedua, Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi, untuk melindungi industri dalam negeri khususnya. Industri kecil dan menengah atau IKM sebagaimana amanat Undang-Undang **Perdagangan** Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 3 yang menyatakan, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu dalam negeri dan untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan tambatan, hambatan tarif dan **nontarif** dan perdagangan barang tidak serta-merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan.

Demikian pandangan kami sampaikan. Sebagai ikhtiar kami dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan serta para **menteri** serta hadirin semua yang kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Jazuli Juwaini sekretaris Ledia Hanifa Amalia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih kita lanjut dengan Fraksi PAN. Bapak Abdul Hakim Bafagih, silakan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan **Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*. Dibacakan oleh Abdul Hakim Bafagih Nomor anggota A506, daerah pemilihan Jawa Timur 8.

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, beserta Wakil Menteri Perdagangan,

Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang pagi hari ini diwakili oleh Wakil Menteri,

Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili oleh Stafsus, dan juga

Pimpinan beserta Anggota Komisi VI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan **hidayah-Nya** kepada kita. Sehingga, kita masih bersemangat untuk menjalankan tugas konstitusional kita dalam rangka menyampaikan pandangan umum **fraksi** tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA di tengah situasi wabah pandemik Covid 19 ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, memajukan kesejahteraan umum. Sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian nasional, kerja sama perdagangan internasional sangat mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa akses pasar, penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, program kerja sama ekonomi, fasilitasi perdagangan dan yang lainnya. Sehingga, dapat berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.

Indonesia sudah melakukan kerja sama perdagangan internasional salah satunya dengan negara-negara EFTA. Guna meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, **Pemerintah** Republik Indonesia dan Pemerintah negara-negara EFTA telah menandatangani kesepakatan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif tersebut pada 16 Desember 2018 lalu. Namun demikian, hingga saat ini persetujuan kemitraan tersebut belum disahkan. Sehingga, manfaat dari persetujuan kemitraan ekonomi tersebut masih belum bisa dimanfaatkan oleh negara-negara terkait khususnya Indonesia.

Fraksi PAN menilai bahwa pengesahan persetujuan kesepakatan ini perlu segera dilakukan agar Indonesia segera memperoleh manfaatnya seperti, peningkatan ekspor, investasi, serta daya saing antar negara terkait. Lebih lagi di tengah perekonomian Indonesia yang masih mengalami tren yang kurang baik akibat pandemik Covid 19 ini.

Pengesahan persetujuan kemitraan kerja sama ekonomi ini diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi di negara kita.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati beserta Bapak Menteri Perdagangan.

Terkait dengan pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif ini, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan penting yang akan kamu sampaikan dalam pendapat akhir mini **fraksi**.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami Fraksi PAN siap membahas tentang pengesahan persetujuan kemitraan ini bersama dengan pemerintah dan seluruh **fraksi** di Komisi VI. Hal-hal lain secara detail akan kami sampaikan dalam pendapat akhir mini **fraksi**. Sekian pandangan umum dari Fraksi PAN. Terima kasih.

Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik dan yang terakhir dari Fraksi PPP, Bapak Achmad Baidowi, silakan.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):

Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The EFTA States* atau **Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh Ahmad Baidowi nomor Anggota A472.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Rapat,

Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan, dan

Wakil Menteri Perdagangan,

Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri,

Yang terhormat perwakilan dari Menkumham, serta

Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa melaksanakan, menghadiri rapat kerja Komisi VI dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati, serta Perwakilan pemerintah.

Kami mempersingkat pandangan umum yang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kemitraan ekonomi-ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA diharapkan dapat membuka akses pasar, memperkuat transfer teknologi, pengetahuan dan kapasitas serta mendorong investasi bagi Indonesia. Selain itu, kerja sama ini diharapkan juga sebagai hak atau penghubung bagi Indonesia untuk mengakses pasar Uni Eropa.

Fraksi PPP mencatat bahwa negara-negara Eropa selalu mengaitkan isu keberlanjutan lingkungan terkait dengan produk pertanian Indonesia. Sehingga, penurunan tarif yang diperjanjikan dikhawatirkan tidak bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Fraksi PPP mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi isu tersebut di Uni Eropa. Nanti kami minta penjelasannya dalam pembahasan. Tentu Fraksi PPP juga berharap kerja sama ini juga prioritas perlindungan terhadap produksi dalam negeri, tidak merugikan Indonesia. Tentu nanti akan kami bahas dalam pembahasan berikutnya.

Saudara Pimpinan Rapat, Perwakilan Pemerintah, dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Setelah mempelajari surat dari pemerintah, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada intinya siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini ke tahap selanjutnya.

Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Kapoksi Komisi VI Achmad Baidowi ditandatangani dan capnya sudah kering.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Ahmad Baidowi dan tentunya kepada teman-teman dari **fraksi** lain. Sebetulnya, tadi pandangan **fraksi** bisa diserahkan juga langsung ke Pak Menteri. Kalau mau menyerahkan bisa dipersilahkan dulu, menyerahkan.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Nanti saja, Ketua. Sekalian saja nanti.

KETUA RAPAT:

Sekalian ya, luar biasa. Baik setelah kita.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Pak Ketua, serahkan **dululah** ini.

KETUA RAPAT:

Kenapa?

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Pandangan umumnya diserahkan **dululah**. Prosedurnya begitu, Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang kalau mau diserahkan. Nggak apa-apa, sebenarnya ini formalnya diserahkan, nanti pandangan mini **fraksi** diserahkan lagi. Ya, sekarang saja.

(Fraksi-fraksi menyerahkan pandangan Fraksi)

Baik, terima kasih tadi secara umum pandangannya dari hampir semua adalah untuk melanjutkan dan siap untuk membahas. Ada juga tentu dengan

catatan-catatan tertentu, mungkin pada intinya kami sangat mendorong untuk pembahasan ini dilakukan.

Mungkin ada tanggapan dari pemerintah terhadap pandangan umum. Ada? Baik, kalau gitu kita lanjut ke acara berikutnya yaitu, pembahasan materi DIM RUU dan DIM penjelasan yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pembahasan DIM ini saya serahkan kepemimpinannya untuk Saudara saya Bapak Gede Sumarjaya Linggih untuk memimpin.

Ya silakan, Pak.

WAKIL KETUA / F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Ketua Hekal.

Pak Menteri kita bahas DIM, Pak Menteri ya. Daftar Inventarisasi Masalah DIM Rancang Undang-Undang Republik Indonesia, pelaksanaan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*. Persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

DIM Nomor 1, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia. Masih kosong karena belum *di-nomorin*, kalau sudah disahkan baru *di-nomorin* ini. Nomor sendiri tahunnya tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Ini saya rasa ini judul saja nih, setuju Pak Menteri ya.

(RAPAT:SETUJU)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, presiden Republik. DIM 2, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Republik, Presiden Republik Indonesia.

Ini normatif.

(RAPAT:SETUJU)

DIM nomor 3, DIM menimbang bahwa:

a. Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan nasional, internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(RAPAT: SETUJU)

4b. Bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara *European Free Trade Association*, EFTA. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara EFTA telah menandatangani *Comprehensive Economic*

Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia Dengan Negara-negara EFTA) pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia.

(RAPAT:SETUJU)

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Ketua, barangkali sebelum diketuk. Tanya **fraksi**-fraksi barangkali ada yang **(suara tidak jelas)**.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Setuju, setuju.

WAKIL KETUA / F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Dari semua yang *disebutin*, semua setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

5c. Bahwa untuk melaksanakan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia The EFTA States* dan negara-negara EFTA, maka perlu pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The EFTA States* (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA).

Setuju ya, teman-teman?

(RAPAT:SETUJU)

7. Mengingat: 1. Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.

Mengingatnya ini normatif ya. Setuju ya, teman-teman ya.

(RAPAT:SETUJU)

8. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400, 4012 atau empat ribu dua belas).

Setuju ya ini ya, setuju ya teman-teman.

(RAPAT:SETUJU)

9. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002, 2014 tentang **Perdagangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

10. Dengan persetujuan bersama Dewan Republik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan.

(RAPAT:SETUJU)

11. Menetapkan Undang-Undang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA).

(RAPAT:SETUJU)

12. Kok Pasal 1nya kosong ya. 12 Pasal 1 kosong.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

13. Mengesahkan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia. Yang Salinan, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Oh, salinan dan bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **undang-undang** ini.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Catatan saja, mungkin.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak, Pak Dammer sebelah sini.

Jadi, kalau-kalau ini kan menjadi payung saja Pak De. Mungkin, nanti, pada waktu ada perjanjian yang lebih *detail* antar pemerintah, mohon nanti difokuskan kepada Komisi VI.

Itu saja, terima kasih.

WAKIL KETUA / F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Iya, setuju Pak Menteri ya. Masukan saja itu.

14. Pasal 2.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

15. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

16. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

17. Disahkan di Jakarta pada tanggal dan Republik Indonesia, Joko Widodo. Sekian.

(RAPAT:SETUJU)

18. Diundangkan di Jakarta pada tanggal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

19. Lembaran-lembaran Republik Indonesia tahun, nomor.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

20. DIM 20 ya. Rancangan penjelasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik, tahun titik-titik, tentang *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA).

Setuju ya, 20 ya. Judulnya itu.

(RAPAT:SETUJU)

21. Umum.

(RAPAT:SETUJU)

22. Dalam rangka pemajuan. 22, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satunya melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Dengan adanya persetujuan perdagangan tersebut, Indonesia memperoleh manfaat berupa akses pasar, barang, jasa, penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia, program kerja sama ekonomi dan fasilitas perdagangan.

Setuju? Yang lain, teman-teman. Setuju ya. Formatif.

(RAPAT:SETUJU)

23. Pada tanggal 16 Desember 2018, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara *European Free Trade Association* (EFTA) telah menandatangani *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau (IE-CEPA) negara yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss memiliki reputasi sebagai Mitra perdagangan dan penanaman modal jangka panjang yang terpercaya. Karena, merupakan pasar besar dengan daya beli tinggi serta nilai penanaman modal asing yang tinggi.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

24. Persetujuan IE-CEPA akan menjadi persetujuan pertama Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa. Penandatanganan persetujuan IE-CEPA menjadi tonggak sejarah hubungan kerja sama para pihak sekaligus memenuhi arahan presiden agar perundingan diselesaikan secepat mungkin dengan tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Ini ini yang digarisbawahi, Pak Herman Khaeron tadi Pak ya. Setuju, Pak ya.

(RAPAT:SETUJU)

Sekaligus sebenarnya ini kepentingan kita adalah untuk saya kemarin ketemu duta besar Swiss untuk meminta mereka juga melobi agar kelapa sawit kita masuk ke Eropa Union, Pak.

25. Persetujuan, persetujuan IE-CEPA dapat menjadi pintu masuk atau "Hub" untuk ham, ham untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa dan penanaman modal baik ke negara Eropa lainnya maupun ke negara yang telah menjalin *Free Trade Agreement* dengan negara-negara EFTA. Selain itu, EFTA memiliki 29 persetujuan perdagangan dengan total 40 negara di dunia. Sehingga, permintaan negara-negara EFTA akan produk-produk Indonesia baik berupa bahan mentah, maupun produk setengah jadi berpotensi meningkatkan untuk memenuhi permintaan pasar dan negara-negara mitra EFTA tersebut.

Setuju, Pak Menteri ya.

(RAPAT:SETUJU)

2x ketok, karena setuju di sini. Ini cepat ini, ini undang-undang tercepat ini.

26. Persetujuan IE-CEPA diinisiasi pada tahun 2005 dan dilanjutkan dengan pembentukan studi kelayakan bersama (*Join Study Group*) yang menyimpulkan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat bagi, baik bagi para pihak karena sifat kerja sama yang saling komplementer atau saling melengkapi. Pada tanggal 7 Juli

2010, perundingan IE-CEPA meluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Swiss (mewakili EFTA) berdasarkan prinsip-prinsip komprehensif, saling menghargai (*Mutual Respect*), semangat yang konstruktif (*Constructive Spirit*), kesetaraan, kedaulatan (*Sovereign Equality*), dan saling menguntungkan (*Common Benefit*) dengan pengakuan pada perbedaan dan tingkat pembangunan para pihak.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

27. Setelah berlangsung selama 9 (Sembilan) putaran, perundingan dihentikan sementara pada tahun 2014, karena proses pergantian pemerintahan di Indonesia pada tahun 2016. Indonesia dan negara-negara EFTA sepakat melanjutkan perundingan dan berhasil menyelesaikan secara substansial pada pertemuan di Bali pada tanggal 21 Oktober sampai 1 November 2018. Pada tanggal 23 November 2018, para pihak mengeluarkan pernyataan bersama yang menandatangani, yang menandakan selesainya proses perundingan. Persetujuan ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah paling sedikit dua negara EFTA dan Indonesia menyampaikan dokumen ratifikasinya.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

28. Persetujuan IE-CEPA terdiri dari 12 Bab, 17 lampiran dan 17 keterangan tambahan dari lampiran. Materi pokok yang diatur dalam persetujuan IE-CEPA antara lain mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak, kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan, persaingan usaha perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Setuju ya, 28 ya.

(RAPAT:SETUJU)

29. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan disahkan persetujuan ini, maka Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan ekspor, penanaman modal, mendorong kerja sama ekonomi dan peningkatan daya saing antara Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

30. II. Pasal demi Pasal.

(RAPAT:SETUJU)

31. Pasal 1, cukup jelas ya.

(RAPAT:SETUJU)

32. Pasal 2, cukup jelas ya.

(RAPAT:SETUJU)

33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Cukup ya.

(RAPAT:SETUJU)

Saya kembalikan ke Pak Pimpinan, Pak Hekal.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Luar biasa. Pembahasan DIM yang singkat. Ini kalau gaya kerja **kabinet** ini. Mudah-mudahan perdagangan bisa secepat itu nanti ya.

Baik, setelah kita selesai pembahasan DIM. Kita harus memberikan pendapat **akhir mini fraksi**. Kembali lagi dari jubir masing-masing **fraksi**. Jadi, kali ini kita.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya kira diskors dulu, Pak Hekal. 5 menit **diskors** dulu ya.

KETUA RAPAT:

Gitu ya. Persiapan untuk materi pandangan **mini fraksi** kita skors dulu, Pak. Itu palu di Pak Martin.

Baik, ini kita skors dulu selama 5 menit, baik.

(RAPAT DI SKORS PUKUL 11.23 WIB)

Baik, sudah bisa dilanjutkan? Oke, teman-teman sudah siap ya ini ya, pandangannya. Baik, skorsnya kami cabut.

(SKORS DICABUT 11.32 WIB)

Dan sekarang telah datang waktunya untuk kita menyampaikan pandangan akhir **mini fraksi** dan demi keadilan kita balik urutannya. Sekarang, kita kasih ke PPP dulu untuk membacakan.

Silakan, Pak Baidowi.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M. Si.):

Makasih.

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-

negara EFTA. Disampaikan oleh juru bicara, Ahmad Baidowi nomor Anggota A472.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Rapat,

Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan, dan

Wakil Menteri Perdagangan serta jajaran,

Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri beserta jajaran,

Yang terhormat perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,

Yang terhormat teman-teman rekan-rekan Anggota Komisi VI DPRRI dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa. Karena taufik dan karunia-Nya, maka pada saat ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi VI dalam keadaan sehat *wal afiat* dan dalam membahas RUU ini termasuk yang tercepat dalam sejarah DPR gitu dan ini menunjukkan bahwa DPR juga punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah **undang-undang**.

Jadi, ini komitmen dan semangat nasionalismenya antara pemerintah dan DPR berkomitmen untuk mempercepat dalam pembahasan **undang-undang**. Jadi, kalau ada yang mengatakan DPR selalu lambat, tidak juga. Buktinya hari ini kita cepat gitu, tergantung kata Pak Herman Khaeron.

Pimpinan yang kami hormati,

Beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia jika IE-CEPA diratifikasi oleh Swiss dan Liechtenstein akan menghapuskan 7.402 pos tarif yang setara dengan 81,70% produk ekspor RI ke negara tersebut. Indonesia akan mendapat pembebasan bea masuk untuk 6.333 pos tarif dari Norwegia yang setara dengan 90,97% produk ekspor Indonesia ke Norwegia dan Islandia akan menghapuskan 8.100 tarifnya atau sekitar 94,28% dari total produk ekspor Indonesia.

Selain itu, perjanjian IE-CEPA bisa menjadi pintu masuk produk ekspor Indonesia ke Eropa. Sebab, negara-negara kita memiliki perjanjian kerja sama dagang dengan negara Uni Eropa.

Anggota Komisi VI dan perwakilan pemerintah yang kami hormati,

Setelah perjanjian ini diratifikasi. Maka, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan kebijakan perdagangan antara kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional dengan kemitraan ekonomi yang Indonesia jalin dengan negara-negara EFTA, maupun dengan berbagai negara lainnya.

Pencapaian tujuan kemitraan jangan mengorbankan perekonomian negara dan kedaulatan negara. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk tetap

melakukan *monitoring*, evaluasi dan perbaikan dalam implementasi kesepakatan ini nantinya.

Fraksi PPP juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat IE-CEPA dan meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar Negara EFTA. Di samping itu, Fraksi PPP meminta pemerintah untuk membantu dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi untuk dapat mengakses pasar EFTA, memperoleh tarif yang rendah, proses administrasi yang mudah dan sederhana serta membantu para pelaku UMKM dan koperasi dalam menghadapi hambatan **nontarif** di negara-negara tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI, serta Perwakilan pemerintah yang berbahagia.

Demikianlah pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan selanjutnya dengan mengucapkan, "*Bissmillahirrahmanirrahim*" Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA untuk disahkan menjadi **undang-undang** dalam **Rapat Paripurna DPRRI** yang terdekat.

Akhirnya, kepada semua pimpinan dan anggota serta para **menteri** serta rekan-rekan media serta hadirin yang hadir pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesabarannya mendengarkan dan memperhatikan pendapat akhir **mini fraksi** kami.

Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi Kapoksi Komisi VI DPRRI. Ditandatangani sendiri.

KETUA RAPAT:

Dan silakan diserahkan;

Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada Fraksi PAN. Pak Abdul Hakim, silakan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA, *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*.

Dibacakan oleh Abdul Hakim Bafagih, Nomor anggota A506 daerah pemilihan Jawa Timur 8.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan juga

Wakil Menteri Perdagangan,

Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri,

Yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Stafsus, beserta

Seluruh Pimpinan, dan Anggota Komisi VI baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual yang kami hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga, kita masih bersemangat untuk menjalankan tugas konstitusional kita dalam rangka menyampaikan pendapat akhir **mini fraksi** tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA di tengah situasi wabah pandemi Covid-19 ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VI, beserta Seluruh perwakilan dari pemerintah.

Seperti sebelumnya yang telah kami sampaikan dalam pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional. Dalam pendapat akhir **fraksi** kami, akan kami sampaikan beberapa catatan penting terkait dengan pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif ini.

Yang pertama, sikap keterbukaan ekonomi antar negara menjadi sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong mobilitas sumber daya alam maupun manusia antar negara berjalan lebih cepat dan lebih mudah. Fenomena ini tidak bisa dihindari dan akan melahirkan tantangan sekaligus peluang yang perlu dihadapi dengan dukungan regulasi yang mengatur lalu lintas sumber daya tersebut.

Kemudian yang kedua, dalam menjalin kerja sama ekonomi, Indonesia harus memegang prinsip-prinsip komprehensif, saling menghargai, semangat membangun, kesetaraan kedaulatan dan saling menguntungkan. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak dapat ditegakkan bahkan melahirkan hubungan yang tidak seimbang bahkan merugikan, maka pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kerja sama tersebut dan membuat keputusan yang sangat tegas.

Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Kerja sama ekonomi dengan negara-negara EFTA yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut akan sangat bernilai positif bagi perekonomian Indonesia terutama dalam bangkit dari resesi ekonomi yang selama 1 tahun ini telah terjadi. Untuk mencapai

target pertumbuhan ekonomi pasca resesi sangat dibutuhkan investasi yang berkualitas. Melalui kerja sama ini, diharapkan pertumbuhan investasi negara-negara EFTA khususnya dan Eropa pada umumnya akan ikut meningkat.

Nilai perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EFTA juga diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, pasar ekspor Eropa yang selama ini masih sulit ditembus dapat terbuka bagi para pelaku industri domestik, khususnya untuk produk-produk UMKM kita.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI, dan juga Perwakilan dari pemerintah yang kami hormati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan beberapa catatan dari kami dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, Fraksi PAN DPRRI dengan mengucapkan, "*Bismillahirrahmanirrahim*" menyatakan menerima pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA untuk disahkan menjadi **undang-undang** dalam Rapat Paripurna DPRRI.

Sekian dari kami, Pimpinan.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Maret 2021 Pimpinan Fraksi Partai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi. Eko Hendro Purnomo, Sekretaris Fraksi. Telah ditandatangani dan distempel.

Terima kasih dan akan saya berikan kepada pimpinan beserta Bapak Menteri Perdagangan

KETUA RAPAT:

Baik, itu Anggota termuda Komisi VI. Sekarang kita dari Fraksi PKS, kelihatannya Bu Nevi lagi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Silakan, Ibu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Pendapat akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA, *Indonesian European Free Trade*

Association Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia EFTA CEPA. Disampaikan Hj. Nevi Zuairina, nomor Anggota A416.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,
Menteri Perdagangan Republik Indonesia bersama jajaran,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama jajaran,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia bersama jajaran,
Rekan-rekan wartawan, serta
Hadirin yang kami muliakan.**

Kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI, Para Menteri, serta hadirin yang kami hormati.

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian nasional yang dapat dilakukan melalui kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangsa Indonesia saat ini telah melalui beberapa fase kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kemakmuran bersama. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka tata kelola yang baik dan transparan di seluruh lembaga-lembaga negara harus diterapkan.

Beberapa waktu yang lalu Komisi VI melakukan serangkaian pembahasan mengenai rancangan, mengenai rencana kerja sama kemitraan komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Swiss di bidang perdagangan, barang, jasa, investasi dan kerja sama ekonomi.

Di era globalisasi belakangan ini, kerja sama perdagangan **internasional** merupakan suatu keniscayaan. Negara-negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang dapat menyebabkan batas-batas kedaulatan ekonomi suatu negara akan semakin hilang.

Perekonomian di era globalisasi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat membuka peluang sebuah negara untuk menjaga produk dalam negeri

ke pasar internasional, di sisi lain dapat membuka peluang membanjirnya produk-produk impor yang masuk ke dalam negeri.

Perdagangan internasional diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi keuangan negara maupun bagi kemakmuran rakyatnya. Di tengah kondisi neraca perdagangan Indonesia saat ini, dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik rentang tahun 2020, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 21,73 Miliar US Dollar. Jauh lebih tinggi dari pencapaian pada periode yang sama pada tahun 2019 yang mengalami defisit 3,59 miliar US dollar.

Oleh karenanya, rencana kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang **Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi**, ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA, Indonesia *Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* harus benar-benar dikaji secara matang. Dengan harapan kerja sama kemitraan yang terjalin dapat memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan penggalan informasi yang telah kami peroleh, maka terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. **Di antaranya** adalah aspek perlindungan industri dalam negeri dan aspek neraca perdagangan Indonesia terkait dengan rencana kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI, Para Menteri serta hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan kemitraan ekonomi komprehensif Republik Indonesia negara-negara EFTA ini, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa adanya kemitraan ekonomi komprehensif Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA harus dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia.
2. Fraksi PKS berpendapat bahwa dengan adanya kemitraan ekonomi komprehensif Republik Indonesia dengan negara-negara EFTA harus dapat mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah sebagaimana, sebagaimana amanat Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 54 Ayat 3 yang menyatakan, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri tertentu dalam negeri dan untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan.
3. Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan hambatan tarif dan **nontarif** dalam perdagangan barang tidak serta merta dapat menghilangkan ketentuan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia khususnya produk makanan dan minuman baik kemasan maupun olahan.

Pimpinan, dan Anggota Komisi VI, Para Menteri serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, seraya mengucapkan, "*Bissmillahirrahmanirrahim*" menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Republik Indonesia negara-negara EFTA, Indonesia *European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* Indonesia EFTA CEPA.

Sepanjang memenuhi pertimbangan tersebut di atas dan untuk selanjutnya dapat segera diproses pada tahap berikutnya sebagaimana diatur dalam **Tata Tertib** DPRRI.

Demikian pendapat akhir **mini** Fraksi PKS ini kami sampaikan. Sebagai ikhtiar kami dalam mewujudkan keadilan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan, Anggota Dewan Komisi VI, para **menteri** dan hadirin kami muliakan, kami ucapkan terima kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Maret 2021. Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Jazuli Juwaini. Sekretaris Media Hanifa Amelia, ditandatangani.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Karena, disampaikan secara virtual, penyerahan virtual. Baik, kita lanjut Partai Demokrat, silakan Pak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pandangan **mini** Fraksi Partai Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rencana pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and the EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh Doktor Insinyur Herman Khaeron, M.Si. Nomor Anggota A544.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu, Namoh buddhaya, Salam kebajikan,

**Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Wakil Menteri Perdagangan, serta
Seluruh staf yang hadir,
Menteri Luar Negeri atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan HAM yang mewakili,
Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI, beserta
Seluruh Sekretariat di belakangnya.**

Ini nggak pernah disebutkan, sekarang saya sebut.

Serta hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala* Tuhan **Yang Mahakuasa** atas rahmat dan karunia-Nya serta yang tak terhingga pada pagi ini, kami Fraksi Demokrat dapat berkesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir **mini fraksi** terkait rencana ratifikasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and the EFTA States* atau IE-CEPA.

Berdasarkan Pasal 84, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur bahwa perjanjian perdagangan internasional yang ditandatangani oleh pemerintah disampaikan kepada DPR untuk dibahas mengenai perlu atau tidaknya perjanjian tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR.

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang **Nomor 24 Tahun 2000** tentang **Perjanjian Internasional** juga menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan dalam bentuk **undang-undang**. Apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Pembahasan ratifikasi IE-CEPA telah melalui serangkaian proses yang panjang tepatnya sejak tahun 2005, pembahasan ini sempat tertunda akibat adanya pandemi Covid 19, akan tetapi karena adanya komitmen kuat di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Maka, proses pembahasan dan ratifikasi tersebut tetap dilanjutkan.

Terkait rencana ratifikasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk membuka akses pasar baru yang lebih luas melalui ratifikasi IE-CEPA. Kerja sama IE-CEPA harus dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan nilai tambah dari produk-produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, serta membuka kesempatan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan UMKM sebagai prioritas utama.
2. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar perjanjian IE-CEPA dapat memberikan ruang untuk fasilitas perdagangan dan investasi agar menjadi stimulus iklim penanaman modal di Indonesia. Sehingga, kemampuan ekspor Indonesia di pasar Eropa dapat lebih

optimal, sehingga dapat mendorong indeks partisipasi Indonesia dalam global *value chance*.

3. Fraksi Partai Demokrat berharap melalui perjanjian IE-CEPA akan meningkatkan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan dan *transfer of technology*. Sehingga, kualitas SDM Indonesia dapat lebih meningkat dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perjanjian IE-CEPA.
4. Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk tetap melakukan upaya proteksi atas komoditas unggulan hasil produksi dalam negeri agar tidak dirugikan akibat penerapan kebijakan atau regulasi di negara lain. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan perjanjian IE CEPA, sehingga semangat kerja sama ini tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang saling menghargai (*Mutual Respect*) dengan semangat yang konstruktif (*Constructive Spirit*), kesetaraan kedaulatan (*Sovereign Equality*) dan saling menguntungkan (*Common Benefit*).
5. Fraksi Partai Demokrat mendorong kepada pemerintah bahwa ratifikasi IE CEPA juga harus mampu meningkatkan kerja sama perdagangan jasa, khususnya kerja sama di bidang pariwisata dengan mengusung konsep *sustainability tourism* bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, serta dapat mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-negara yang tergabung dalam kerja sama IE-CEPA.

Berdasarkan beberapa catatan tersebut di atas, maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui ratifikasi tentang *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA untuk dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.

Demikian pandangan akhir **mini** Fraksi Partai Demokrat terhadap rencana ratifikasi *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau IE-CEPA. Semoga, DPRRI dapat terus melahirkan produk-produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena, harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Maret 2021. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono, Nomor anggota A554, Sekretaris Marwan Cik Hasan, Nomor Anggota A 535, ditandatangani.

Saya kira itulah pernyataan kami dan kami haturkan terima kasih. Solid dan berdaulat!

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita lanjut, Fraksi PKB. Mas Tommy, silakan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat akhir Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRRI tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRRI, Tommy Kurniawan, Nomor Anggota A11.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI; beserta dengan seluruh Anggota Komisi VI DPRRI,

Yang kami hormati saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya,

Yang kami hormati saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya,

Yang kami hormati saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajarannya, serta

Hadirin yang berbahagia.

Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir **mini** Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang **Kemitraan Ekonomi Komprehensif** Indonesia dengan negara-negara EFTA ini.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa senantiasa mendukung setiap upaya membuat peraturan yang berkualitas sebagai pelaksanaan dari salah satu fungsi DPRRI yakni, legislasi dalam rangka memperkuat sistem hukum kita sebagai negara yang berdaulat. Salah satu upaya penguatan sistem hukum itu adalah dengan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Negara-negara anggota EFTA adalah **mitra** dagang Indonesia yang sangat potensial. Kendati saat ini, masih ada **mitra** yang mencatatkan defisit perdagangan. Tetapi, kerja sama yang menguntungkan bisa di jalankan oleh kedua belah pihak dengan memfokuskan pada produk unggulan masing-masing.

Dalam rangka mendorong Indonesia sebagai negara yang kuat di bidang ekonomi, kami telah mempertimbangkan bahwa kerja sama dengan negara-negara EFTA memiliki dampak yang cukup signifikan untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan RUU tentang pengesahan kerja sama ini dapat diselesaikan tepat waktu demi terwujudnya peningkatan kinerja perdagangan Indonesia.

Saudara Pimpinan sidang, anggota Dewan, Para Menteri, serta hadirin yang terhormat.

Selanjutnya, setelah mengikuti dan mempertimbangkan seluruh proses yang berlangsung. Maka, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucapkan, “*Bismillahirrahmanirrahim*” menyatakan persetujuannya agar Rancangan Undang-Undang tentang kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA, selanjutnya disahkan menjadi **undang-undang** dalam Rapat Paripurna.

Atas perhatian saudara Pimpinan dan para anggota serta para **menteri**, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRRI mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta ‘ala* senantiasa memberikan **petunjuk-Nya** untuk kita semuanya.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 19 Maret 2021. Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRRI Haji Cucun Syamsurizal dan Sekretaris Fraksi Doktor Fathan, ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA KOMISI VI/ F-PKB (FAISOL RIZA, S.Sos.):

Terima kasih, Pak Tommy.

Selanjutnya, saya persilakan juru bicara Fraksi Partai Nasdem. Iya, betul ya serahkan dulu ke pimpinan dan para **mitra**.

Baik, selanjutnya saya persilahkan juru bicara partai, Fraksi Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih.

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Nasdem DPRRI tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia and The EFTA State* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Disampaikan oleh Rapsel Ali, nomor Anggota A396.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syalom, Salam sejahtera,

Om swastiastu, Namo buddhaya,

Salam kebajikan dan salam restorasi,

Yang terhormat pimpinan Komisi VI DPRRI,

Rekan-rekan Anggota Komisi VI DPRRI yang saya hormati dan banggakan,

Saudara Menteri Perdagangan,

Saudara Wakil Menteri Perdagangan,

Saudara Wakil Menteri Luar Negeri, dan

Saudara Staf Ahli Menkumham beserta seluruh segenap jajarannya.

Mempersingkat waktu, dengan berbagai pertimbangan dan harapan tersebut serta mengucapkan, "*Bismillahirrahmanirrahim*" kami atas nama Fraksi Partai Nasdem DPRRI menyetujui *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and the EFTA States* persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan tersebut.

Demikian pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Nasdem DPRRI, DPRRI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat dan **hidayah-Nya** kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan posisi kita masing-masing secara baik-baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Syalom, Salam sejahtera,

Om Santi Santi Santi om, Namo buddhaya,

Salam kebajikan serta salam restorasi.

Dengan persetujuan Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Ahmad HM Ali, Sekretaris Sahat Mustafa.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita lanjut ke Fraksi Gerindra.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B. Bus., M.M., MBA.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Gerindra DPRRI terhadap RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Dibacakan oleh Husein Fadlulloh, Anggota Nomor A94.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera,

**Syalom, Om Swastiastu,
Namo buddhaya, Salam Indonesia Raya,**

**Yang kami hormati Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI DPRRI,
Saudara Menteri Perdagangan,
Saudara Wakil Menteri Perdagangan,
Saudara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga,
Saudara Wakil Menteri Luar Negeri, serta
Seluruh hadirin yang berbahagia.**

Fraksi Partai Gerindra telah mempelajari dengan seksama perjanjian IE-CEPA. Maka, izinkan kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Gerindra sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara EFTA melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, IE-CEPA dapat memungkinkan peningkatan dan diversifikasi perdagangan dan investasi 2 arah, yang tentunya membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia dan negara-negara EFTA.

Kami berharap menjadi sarana untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara yang terlibat menuju hubungan ekonomi yang lebih kuat serta berkontribusi, kontribusi penting pada kelanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkesinambungan bagi rakyat Indonesia.

2. Indonesia dan Norwegia secara resmi sudah membuka hubungan diplomatik pada 25 Januari tahun 1950. Norwegia menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Kami berharap hubungan kedua negara terus meningkat dan menguat di semua bidang yang berkembang dalam berbagai bentuk kerja sama.

Total nilai perdagangan Indonesia dengan Norwegia pada tahun 2018 mencapai US **dollar**, 242,13 **juta US dollar**. Nilai total investasi Norwegia di Indonesia selama periode 2014-2018 mencapai 40,2 **juta US dollar**.

Pada tahun 2018, negara-negara Eropa melakukan aksi protes terhadap produk sawit RI. Norwegia salah satu negara Eropa yang juga melakukan aksi penolakan. Kami berharap Norwegia sebagai anggota dari EFTA tidak melakukan aksi proteksi pasar terhadap semua produk Republik Indonesia.

Sesuai dengan Kementerian **Lingkungan Hidup dan Iklim** KLHI Norwegia, menggunakan, penggunaan *palm oil* kurang dari 1% dari total bayar Norwegia. Sementara, berdasarkan data biro statistik Norwegia, keseluruhan impor *palm oil* dan *bio palm oil* di Norwegia dari Indonesia juga relatif kecil yaitu, kurang dari 1% keseluruhan produk yang diimpor Norwegia dari Indonesia.

4. Sebagai negara kepulauan dengan banyak gunung berapi, Indonesia dan Islandia sama-sama memiliki energi panas bumi yang bersih dan terbarukan yang melimpah. Kemitraan tersebut mencakup riset teknologi, investasi, pengembangan proyek dan pelatihan. Menurut catatan badan geologi potensi panas bumi di Indonesia terbesar 23,9 GW hingga Desember 2019. Berdasarkan data Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 MW. Masih banyak yang belum dimanfaatkan. Kami berharap target pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan panas bumi menjadi 7.241,5 MW atau 16,8% di tahun 2025 bisa terlaksana. Sehingga, penggunaan pembangkit listrik tenaga berbahan bakar fosil yang ramah, yang tidak ramah lingkungan bisa *diminimalisir*.
5. Program produksi kakao berkelanjutan *Sustainable Cocoa Production Program* atau SCPP yang didukung oleh Swiss dirancang dengan baik dengan memperhatikan kepentingan para petani kecil kakao. Salah satu kekuatan utama dari program SCPP adalah pendekatannya yang menyeluruh dalam meningkatkan rantai nilai kakao dengan berkerja-sama dengan seluruh pemangku kepentingan utama dalam industri kakao, termasuk petani, pembeli dan perusahaan pengolah. Kami berharap Indonesia bisa menjadi produsen kakao terbesar di dunia dengan kerja sama SCPP ini.
6. Inovasi teknis dan non teknis dari Liechtenstein yang berkarya di Indonesia di wakili oleh PT Hilti Nusantara. PT Hilti Nusantara dikenal dengan teknologi yang canggih yang dapat meningkatkan produktivitas proyek-proyek konstruksi. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus kemenangan, fokus *sorry* fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo menurut *study* LPEM. Fasilitas ekonomi Indonesia kenaikan infrastruktur jalan sebesar 1% bisa menekan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8%. Dengan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia EFTA, kami berharap PT Hilti Nusantara dapat meningkatkan kapasitas untuk menghadirkan dan memperkenalkan teknologinya yang canggih ke pasar Indonesia secara lebih cepat waktu dan hemat biaya.
7. Kami berharap persetujuan IE CEPA dapat menjadi pintu masuk atau *hub* untuk meningkatkan akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa, dan penanaman modal baik negara Eropa lainnya maupun ke negara-negara yang telah menjalin *Free Trade Agreement* dengan negara EFTA. Sehingga, pemerintah negara-negara EFTA akan produk-produk Indonesia baik berupa bahan mentah maupun produk setengah jadi bisa berpotensi meningkat untuk memenuhi permintaan pasar dari negara-negara **mitra** EFTA tersebut.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,
Saudara Menteri Perdagangan selaku Wakil Pemerintah, serta
Seluruh Wakil, Seluruh hadirin yang berbahagia.**

Demikian beberapa catatan yang perlu diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, Fraksi Gerindra menerima Rancangan Undang-Undang tentang **Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara EFTA agar dibahas lebih lanjut ke tingkat berikutnya.

Kami Fraksi Gerindra berharap perjanjian ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjadi kunci peningkatan ekspor Indonesia.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan Salam Indonesia Raya.

Jakarta, 18 Maret. Ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, Nomor Anggota A75 dan Wakil Sekretaris Fraksi Bapak Dokter, Doktor Supratman Andi Agtas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita lanjut Fraksi Golkar.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*. Dibacakan oleh Drs. H. Mukhtaruddin, Nomor Anggota A334, daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Yang kami hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan

Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia,

Yang kami hormati Wakil Menteri Luar Negeri,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan HAM dan atau yang mewakili,

Para Pimpinan Komisi VI DPRRI, dan

Para Anggota yang kami muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk kembali memanjatkan puji dan syukur ke hadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, sehingga kita dapat mengikuti rapat penyampaian pendapat akhir **mini** Fraksi terhadap persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA.

Liechtenstein, Norwegia dan Swiss telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Dalam dunia perdagangan dan investasi, negara-negara yang tergabung dalam EFTA tersebut memiliki reputasi dan integritas yang sangat baik dan terpercaya. Negara-negara tersebut juga memiliki pasar dan daya beli yang tinggi serta nilai penanaman modal asing yang tinggi. Secara historis, perjanjian ini dimulai pada tahun 2005 dengan pembentukan studi kelayakan bersama atau *join study group*. Selanjutnya, pada 7 Juli 2010 perjanjian tersebut diluncurkan dengan menjalankan prinsip-prinsip komprehensif, saling menghargai atau *mutual respect* semangat yang konstruktif, kesetaraan kedaulatan atau *sovereign equality* dan saling menguntungkan atau *common benefit*. Berbagai pihak yang telah melaksanakan perjanjian. Perjanjian tersebut bersifat saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain.

Bapak-Bapak hadirin yang saya hormati.

Dengan ada persetujuan perdagangan tersebut, tentunya Indonesia diharapkan dapat memperoleh berupa akses peranan modal, peningkatan ekspor, pembangunan sumber daya manusia, program kerja, program kerja sama ekonomi dan fasilitasi perdagangan. Kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian tersebut tentunya merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu dalam hal ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran daripada **menteri-menteri** di bidang ekonomi, dalam rangka meningkatkan perdagangan dengan mitra-mitra **nontradisional** yang utamanya di Eropa Barat.

Nah, kesepakatan tersebut tentu juga menunjukkan Indonesia mampu berbuat perjanjian bebas dengan negara-negara lain **nonMitra** tradisional. Nah, melalui perjanjian ini, Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk peningkatan ekspor, penanaman modal, mendorong kerja sama ekonomi, peningkatan daya saing Indonesia dengan negara EFTA dan tentu tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka Fraksi Partai Golongan Karya dengan mengucap, "*Bissmillahirrahmanirrahim*" dapat menyatakan persetujuan dan menyetujui terhadap persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA, *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* dan selanjutnya untuk diambil kepada keputusan tahap berikutnya di **paripurna** yang terdekat.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golongan Karya DPRRI. Disampaikan Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta 'ala*, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah bagi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Maret 2021. Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Drs. H. Kahar Muzakir Ketua, ditandatangani. Dr. Ir. H. Adies Kadir S.H.,M. Hum, Sekretaris ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Dan untuk yang terakhir kepada Fraksi PDIP.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pendapat akhir **mini** Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Dibacakan oleh Sondang Tiar Debora Tampubolon, Nomor Anggota A158, daerah pemilihan DKI Jakarta 1.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syalom, Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu, Namu buddhaya,

Salam kebajikan.

Merdeka! Terima kasih.

Yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dan

Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Perdagangan,

Yang terhormat Menteri Luar Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, dan

Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan dan Antar Lembaga Kemenkumham.

Pimpinan sidang, dan Para Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati, dan

Para hadirin sekalian.

Setelah menjalani serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai kalangan dan Rapat Dengar Pendapat, serta Rapat Kerja dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, maka kami akan memberikan pendapat akhir **mini** sebagai wadah bagi **fraksi-fraksi** untuk menyatakan sikap.

Para Menteri, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan pada pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRRI, **di mana** ditegaskan bahwa kerja sama di bidang perdagangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara yang menjadi anggota EFTA merupakan suatu kebutuhan. Maka, kami berpendapat bahwa persetujuan tersebut perlu disahkan dalam bentuk **undang-undang**. Sehingga, dapat segera ditetapkan.

Menyadari pentingnya kerja sama perdagangan dengan negara lain, Fraksi PDI Perjuangan DPRRI berpendapat bahwa dalam menjalin kerja sama ini kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRRI mencatat beberapa masalah penting untuk mendapat perhatian kita bersama, yaitu:

1. Nilai ekspor Indonesia ke EFTA selama ini lebih besar daripada nilai impor Indonesia dari EFTA. Surplus perdagangan yang kita miliki ini, tentu merupakan sebuah prakondisi yang baik untuk meraup manfaat yang lebih banyak lagi *pasca* diratifikasinya perjanjian ini. Dari kondisi tersebut, tentunya pemerintah Republik Indonesia harus menerapkan strategi *offensive* dengan memanfaatkan seluruh kekuatan domestik yang ada, guna menarik manfaat sebesar-besarnya dari peluang-peluang yang ada di dalam persetujuan ini.
2. Para pihak harus konsisten menjaga tekad untuk menciptakan aturan yang jelas dan saling menguntungkan yang mengatur perdagangan dan penanaman modal antara para pihak dalam rangka mempromosikan kerangka komersial yang dapat diprediksi, transparan dan konsisten, konsisten bagi dunia usaha guna mewujudkan kesempatan yang lebih besar lagi bagi para pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah.
3. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, pemerintah Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip bahwa persetujuan tersebut harus didasarkan pada persamaan, keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara sebagai suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar.
4. Semua informasi yang bersifat rahasia dibidang perdagangan agar mendapat perlindungan yang secara ketat oleh para pihak.
5. Persetujuan ini hendaknya bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan ekonomi perdagangan Indonesia secara komprehensif sesuai dengan lingkup kerja sama serta berharap adanya dukungan kuat bagi masyarakat untuk dapat terlibat dengan memanfaatkan persetujuan kemitraan ekonomi, ekonomi komprehensif ini.
6. Transfer teknologi diharapkan dapat terjadi setelah disepakatinya perjanjian ini. Sehingga, kemampuan SDM Indonesia dapat semakin terasah dan bisa mengembangkan untuk meningkatkan teknologi baru dan dapat memberikan nilai tambah pada produk-produk yang akan dihasilkan oleh Indonesia.

7. Persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA harus memberikan manfaat peningkatan terhadap akses pasar barang dan jasa, memfasilitasi arus barang, akses promosi dan proteksi penanaman modal, pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Demikian, beberapa catatan yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan persetujuan ini dan pada kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRRI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* atau persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada Rapat Paripurna Dewan untuk kemudian disahkan menjadi **undang-undang**.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus **kepada** yang terhormat Pimpinan Komisi VI dan Anggota Komisi VI DPRRI, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran yang mewakili pemerintah. Ucapan terima kasih kami tunjukkan juga kepada para pakar, pemerhati ekonomi dan perdagangan, rekan-rekan wartawan dan media dan semua pihak yang telah memberikan masukan pendapat dan bantuannya, sehingga pembahasan **rancangan undang-undang** ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syalom, Om Shanti Shanti Shanti Om,

Merdeka!

Pimpinan Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRRI. Ketua Adisatrya Suryo Sulisto, ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kami ucapkan kepada juru bicara masing-masing **fraksi** yang telah menyampaikan pendapat akhir **mini fraksinya**. Setelah mendengarkan pendapat akhir **mini fraksi**, tadi kami dapat simpulkan bahwa seluruhnya 9-9-nya setuju.

Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional setuju dengan catatan yang sudah disampaikan juga, berarti kita bisa simpulkan bahwa 9 **fraksi** di Komisi VI DPRRI dapat menyetujui RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan

tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPRRI untuk disahkan menjadi **undang-undang**.

(RAPAT:SETUJU)

Selanjutnya, kami persilahkan kepada Saudara Menteri Perdagangan RI untuk mewakili.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Izin Bapak **Ketua**, izin Bapak Ketua.

Sebelum ditutup dari langit, sebentar saya mohon waktu.

KETUA RAPAT:

Ini belum ditutup, Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Nggak, saya mohon waktu sebentar.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tenang tante, tante *closing* bagian, tenang.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Bukan, saya sebentar mohon waktu agar kesediaan Bapak Mendag untuk tinggal di tempat sesuai acara ini. Karena, masyarakat di luar itu menunggu aksi kita Komisi VI ini terhadap impor gula, Bapak Ketua.

Biarkan mereka menunggu semua, Pak Mendag ada di sini.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Beras.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Beras, garam.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Agar pertemuan ini dengan Pak Mendag, **menteri-menteri** yang lain atau yang mewakili bisa berangkat, bisa kembali, Bapak Pimpinan.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kita selesaikan agenda pertamanya dulu.

Selanjutnya, kami persilakan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan, saya pikir juga harus *di-respons* itu.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak.

Karena, ini selesaikan agenda ini dulu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Agar itu diselesaikan, pasti ini diselesaikan kan kita setuju agar lancar, cuman agar ada kepastian setelah penutupan rapat ini bahwa *menteri* masih di sini. Sangat tidak bijak, jika kita tidak, kita membiarkan.

KETUA RAPAT:

Iya, nanti pas selesai kita berikan kesempatan untuk ini nih, untuk bahas sedikit.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Saya kira, Ketua. Saya kira kita fokus pada ratifikasi.

KETUA RAPAT:

Betul.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Agenda hari ini, kita pun hadir di sini, saya pun hadir di sini undangannya ratifikasi. Kalaupun, mau dijadwalkan. Ya, silakan agenda lain dan dijadwalkan dulu jangan ujung-ujungnya agenda saat ini, gitu loh. Kita bikin saja agenda nanti setelah selesai, kita kan dibikin kan, baru kita bicara. Jangan kita menyisip-nyisipkan kegiatan.

Ya, terus kan saya juga tidak siap untuk melanjutkan rapat lagi setelah ini. Karena, ada agenda lain.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, ini kita bahas. Ibu-ibu nanti dulu, nanti kita bahasnya selesai agenda pertama ya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Ini marwah kita Komisi VI, Pak Ketua. Publik menunggu.

KETUA RAPAT:

Saya paham Ibu, tolong-tolong jangan kita menyimpang dulu kita selesaikan ini dulu. Nanti sebelum akhir, saya beri kesempatan untuk menyampaikan 1-2 hal itu ya.

Baik, kepada Saudara Menteri Perdagangan RI yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VI yang terhormat,

Ibu Bapak Anggota Komisi VI yang terhormat.

Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga, pada hari ini kita dapat menyelesaikan **rapat kerja** ini dan pada kesempatan ini kami mewakili Presiden mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI, karena dengan dan ketekunan dan semangat yang konstruktif maka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang **Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif** antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembahasan tingkat 1 terhadap **rancangan undang-undang** ini untuk diteruskan ke tahap selanjutnya.

Demikian penyampaian pendapat akhir pemerintah dan atas perhatian Ketua dan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, kami

ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang dilakukan ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa serta berguna bagi kemajuan bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih kepada Saudara Menteri Perdagangan yang telah menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*. Seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States* untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna DPRRI untuk disahkan menjadi **undang-undang**.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, dengan telah diselesaikannya pembahasan terhadap RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, persetujuan **kementerian** kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan negara-negara EFTA dan setelah mendengarkan pendapat akhir **mini fraksi**, **fraksi** dan pendapat akhir pemerintah maka sekali lagi kami meminta persetujuan.

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi VI DPRRI dan Pemerintah.

Apakah RUU tentang pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States*, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada Rapat Paripurna DPRRI untuk disahkan menjadi **undang-undang**?

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, *alhamdulillah* dengan disetujuinya RUU tersebut, untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 pada Rapat Paripurna DPRRI untuk disahkan menjadi **undang-undang**. Maka, acara selanjutnya adalah penandatanganan naskah RUU dan naskah penjelasan.

Untuk itu kami persilahkan untuk disiapkan dulu mejanya.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin-izin Pimpinan sambil disiapkan meja.

Kebetulan ada Kementerian Luar Negeri. Ada yang ingin saya sampaikan suara dari rakyat di.

Terima kasih, Pimpinan.

Ini Pak Menteri Perdagangan, Pak Wakil Menteri Luar Negeri. Saya hanya menitip apa yang ingin disuarakan oleh saudara-saudara kita dari perbatasan. Saya baru kembali dari sana, Pak.

Kemarin, Pertamina membantu masyarakat dengan menerbangkan gas elpiji 12 **kg** langsung ke Krayan dengan pesawat, itu daerah perbatasan terluar kita dengan Malaysia yang tadinya harganya Rp1.400.000 per **kg**, kemudian Pertamina kemarin kirim dengan harga Rp200.000 dan **tabungnya** Rp400.000.

Nah, saya berharap Pak. Mohon bantuan dari Pak Menteri Perdagangan. Bagaimana rakyat di perbatasan kita, karena perbatasan dengan Malaysia itu ditutup, itu ada 4 perbatasan kita PLBN kita di Kalimantan Utara, itu bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang layak, yang terjangkau oleh mereka. Selama ini, ada yang namanya subsidi ongkos angkut, tapi terbatas dari provinsi, sementara yang dari jalur udara itu apa namanya, harganya masih tetap tinggi, Pak.

Jadi, tolong bantu kami masyarakat di apa namanya, di perbatasan sana Pak, supaya bisa mendapatkan sembako ataupun katakanlah bazar sembako murah, Pak. Saya mohon ada waktu nanti, suatu ketika bicara dengan Pak Menteri, Pak Wamen atau Pak Dirjen untuk membahas masalah ini dan juga dari Menlu, Pak. Kami mohon agar ada dua hal yang penting.

Pertama, karena ditutupnya perbatasan dengan Malaysia. Apakah mungkin kita menegosiasikan melalui konjen di sana, di Tawaw atau di Sabah, Pak supaya pada waktu tertentu bisa membuka perbatasan Pak, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sembako yang murah dan terjangkau, Pak

Dan satu lagi perbatasan kita terutama yang di **Sungai Ular**, sering itu mendapatkan korban. Warga kita ditangkap, lalu harus di ini di Malaysia, ini bagaimana kisah kita bisa mengatasi. Karena umumnya, mereka tidak bermaksud masuk ke wilayah Malaysia, tetapi karena keterbatasan alat. Sehingga, mereka sering menyimpang masuk ke perbatasan. Itu kalau sampai di sana, Pak bisa 2 minggu lebih, Pak.

Jadi, saya mohon perhatian. Karena, tidak mudah ketemu dengan Menteri Luar Negeri saya kira, karena bukan **mitra** kami. Mohon bagaimana

mengatasi persoalan ini termasuk 4 PLBN kita itu Pak, sampai sekarang berjalan lambat. Karena, kalau dibawa tanpa ada jalan darat, itu mobilisasi apa namanya, untuk pembangunan PLBN juga terlalu mahal, Pak. Sehingga, tidak mungkin biaya proyek itu menutupi.

Jadi, saya mohon ini perhatian dari Pak Menteri Perdagangan dan Kemenlu, Pak bagaimana mengatasi masalah ini. Kami siap berdiskusi dan mungkin menghadirkan kepala daerah dari Kalimantan Utara untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi, empat daerah itu Pak, Long Nawang, itu Long Nidang, lalu ada daerah Semanggaris Pulau Sebatik dan Labang, Pak. Itu daerah-daerah terluar kita yang perlu perhatian dari pemerintah. Karena, sudah 1 tahun lebih mereka menderita.

Saya kira itu. Terima kasih. Pimpinan, terima kasih.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pimpinan boleh, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Nanti dulu nanti dulu, itu tadi lagi menyiapkan ini. Sekarang kita. Jadi, kita persilakan untuk masing-masing perwakilan dari pada **fraksi**-fraksi Komisi VI DPRRI dan tentunya Bapak Saudara Menteri Perdagangan, Bapak Menlu, Ibu Menlu atau yang mewakili dan dari Menkum HAM yang mewakili untuk maju guna menandatangani naskah RUU dan naskah penjelasan yang telah kita setuju bersama.

Baik, terima kasih.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Baru saja kita menyaksikan penandatanganan naskah RUU yang telah kita sepakati setelah mendengarkan pandangan akhir **mini fraksi** masing-masing.

Dengan telah diterima dan disahkannya RUU tersebut pada Raker Komisi DPR, Komisi VI DPRRI dengan pemerintah pada hari ini, maka selanjutnya kami akan melaporkan dalam rapat pimpinan atau rapat konsultasi pengganti rapat Bamus untuk dapat diagendakan pada **paripurna** untuk mengambil keputusan pada pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi **undang-undang**.

Dan ini sebetulnya agenda kita sudah selesai pada hari ini, cuman tadi ada beberapa kawan-kawan yang ingin menyampaikan satu atau dua hal. Ini tadi PDIP dulu. PDIP, silakan.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Ketua, Pimpinan.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Izin, Daeng Muhammad Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Saya kira agenda kita kan ratifikasi saja.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Mukhtaruddin, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Kami paham, Pak. Ini saya tidak

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Kalau mau ada agenda, nanti kita diskusi lagi.

KETUA RAPAT:

Ini membuka diskusi, ini untuk menyampaikan semua ada minta 1-2 menit.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kan kita minta penjelasan. Rakyat minta penjelasan, masa nggak boleh.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Izin, Pimpinan. Daeng Muhammad, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan, khususnya Bapak Menteri, Menteri Perdagangan.

Diakui atau tidak bahwa pernyataan Bapak tentang rencana impor beras telah menimbulkan kegaduhan. Saya ingin memberikan beberapa hal.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Pimpinan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Yang pertama, tahun 2018 saat bulan Maret, April, Mei ada impor beras ke Indonesia sebesar 1.733 ton, ya 1.000.733 ton. Beras itu sampai sekarang masih, sebagian masih *numpuk* di gudang Bulog, Pak. Kami kebetulan saat kunjungan spesifik juga melihat barang-barang itu dan itu membawa beban yang luar biasa sama Bulog untuk biaya perawatannya.

Namun, ada yang tersimpan dari proses impor beras itu yang ter masih menumpuk di gudang itu. Walaupun berasnya sebagian masih menumpuk di gudang, pada saat itu kan kita tidak kelaparan juga, Pak. Harga juga tidak terjadi gejolak dan sesungguhnya juga saat 2018 itu pun tidak perlu adanya impor beras.

Yang kedua, wacana tentang impor beras yang 1.000.000 ton oleh Menteri Perdagangan telah berhasil menurunkan harga gabah dan dikawatirkan menurunkan mental juang para petani. Rencana impor beras saat panen raya, justru bertolak belakang dengan tekad kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, bahkan menuju ketahanan pangan.

Data BPS, Pak Menteri. Kebetulan kami ikut *rapat* Baleg. Pada saat itu mengundang BPS dan juga mengundang Bulog dan sebelumnya juga Baleg mengundang Menteri Pertanian. Pak Menteri bisa di ini. Bapak mau tanda tangan dulu apa gimana.

Disampaikan bahwa BPS *kuartal* data, BPS data *kuartal* Januari bulan Mei, persediaan beras itu cukup, Pak. Selanjutnya, Menteri Pertanian juga menyampaikan persediaan beras sampai bulan, di saat bulan Ramadan bahkan sampai Idul Fitri persediaan beras aman.

Jadi, dalam kurun waktu 2019 sampai-sampai tahun, sampai bulan Maret tahun 2001, tidak ada impor beras Pak, sampai hari ini tidak ada impor beras. Tidak ada gejolak harga, beras petani sedang panen. Jadi, bahkan ada *pemilu* yang kita lewati dengan sangat baik, tidak ada gejolak harga Pak tentang beras. Pandemi 1 tahun yang kita lewati juga tidak membuat gejolak harga (*suara tidak jelas*) beras.

Lalu, *Saudara* Menteri mau impor beras sesungguhnya untuk siapa ini. Siapa yang saudara mau bela. Kenapa saudara agak *ngotot*, jadi kalau urusan beras bahkan saya, hati saya ngilu. Salahkan saya kalau urusan impor beras, seperti itu yang saya baca di media. Karena, mumpung kita ketemu, tentu tidak cukup urusan ini saja.

Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa 500, cadangan 500 ton itu sudah biasa di Bulog, Pak. Itu sirkulasi, dia bisa besar sampai satu juta, satu juta setengah. Saya tanya langsung dengan Ka Bulog, saya tanya langsung dengan Wakil Ka Bulog. Jadi, sudah biasa. Akhirnya, akan sampai juga di satu setengah juta ton. Hari ini, sudah 900, sudah 900.000 ton. Per hari mereka juga sudah kumpulkan hampir 9.000 ton, jadi bulan April itu sudah sampai satu setengah juta ton itu.

Jadi, atas demi penghormatan kita terhadap petani yang telah berhasil memproduksi kebutuhan strategis bangsa ini, karena kita tidak dapat hidup di

Indonesia tanpa beras dan juga menghentikan politik ketergantungan kita terhadap impor beras, khususnya pangan beras khususnya. Kami menolak impor beras, Pak dan memang tidak pantas dilakukan sekarang dan itu bertentangan dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan lebih jauh adalah ketahanan pangan.

Mohon penjelasan dari Pak Menteri agar ada jawaban yang bisa kita terima, khususnya para petani Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Saya paham ini bukan agendanya.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Ketua, izin **Ketua**.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Mukhtar.

Jadi, saya ingin tanya dulu. Ini kan sebenarnya agenda kita sudah selesai dan juga ada mitra-mitra yang di luar daripada Kementerian Perdagangan. Nah, kalau memang ada 1-2 ini, saya mau dengar dulu dari **fraksi**-fraksi. Apakah ada mau diakomodir masukkan-masukkan seperti ini pada rapat saat ini atau seperti apa, supaya kita agenda utama dan memang **rapat** ini tidak mengundang untuk membahas hal-hal yang lain.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Maaf, maaf, PDIP sudah bicara.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Ditutup dulu, ditutup dulu, Ketua.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Nggak, saya rasa yang lain, **mitra** yang lain bisa keluar dulu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Ibu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Bisa dilanjutkan dengan Mendag.

KETUA RAPAT:

PDIP sudah bicara. Saya kasih kesempatan kepada Pak Mukhtar dulu. Silakan, Pak Mukhtar.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Izin, Pimpinan.

Saya usulkan nih, bukan mau bicara topik itu. Saya kira kita harus tanya Pak Menteri juga apakah waktunya ada untuk bicara soal itu sekarang ya, kalau memang berkenan supaya penjelasan lebih cepat, saya kira tidak masalah. Tapi, kalau Pak Menteri misalnya sudah ada agenda lain yang ini, kita harus agendakan kapan kita bicara soal ini.

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Mukhtar.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Izin, ketua. Terima kasih.

Yang pertama kita, agenda hari ini sesuai undangan yang diterima oleh **anggota** adalah pembahasan tentang ratifikasi. Tidak ada acara itu, agenda itu yang lain selain daripada itu dari ini. Oleh karenanya, kita pun hadir hari ini kesiapan kita adalah untuk mempersiapkan tentang ratifikasi. Kalaupun ini mau dibikin agenda, tentu kita bicarakan dulu dong dibikin agenda dulu, kesepakatan dulu di internal Kapoksi paling tidak ada agenda lain gitu. Kalau belum ada kesepakatan itu, tidak boleh kita bikin agenda dadakan seperti ini.

Mohon maaf kepada teman-teman. Saya sependapat bahwa masalah ini perlu kita bahas. Tapi, forumnya bukan hari ini. Mari kita agendakan dengan waktu yang cukup dan kita mempersiapkan data sebaik-baiknya untuk menyikapi persoalan ini

Jadi, saya kira, usul saya kita *close*. Kalaupun mau, ya kita rapat Kapoksi ya bikin agenda lain. Bikin agenda, kemudian kita susun kapan kita bicara dengan Menteri Perdagangan terkait masalah ini. Kalau perlu kita komprehensif, undang juga Bulog, undang juga rapat gabungan dengan Komisi IV, ya kita membahas ini komprehensif. Tidak sepotong-sepotong.

Kalau hari ini, kita sepotong-sepotong. Kita belum tahu data Bulog seperti apa, Kementan seperti apa, data pertanian seperti apa.

Saya paham ini nggak sensitif, tetapi demi kalau memang kita ingin menyelesaikan persoalan. Kita bicaranya jangan-jangan parsial, tapi kita bicara secara, untuk itu diagendakan secara khusus kalau mau, bukan kita pertemuan ini kemudian ujug-ujug hanya 2-3 menit selesai. Jadi, apa hasil apa hasilnya. *Output-nya* pun, keputusannya pun tidak ada. Karena, kita bukan *raker* terkait itu dan kita tidak berwenang juga untuk mengambil keputusan politik terkait apa pun hari ini, terkait masalah itu. Karena, ini bukan forumnya, bukan jadwalnya untuk masalah itu.

Saya kira itu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Mungkin, ada pandangan dari Gerindra.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M. Si.):

Pimpinan, Fraksi PAN, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti. Ya, kalau gitu ini dulu Pak Rapsel dulu tadi sudah.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih, Pimpinan.

Untuk urusan impor agar bisa lebih *fair*, ada baiknya kita juga mengundang Bulog untuk mendiskusikan hal ini. Karena, Bulog juga merupakan *mitra* Komisi VI.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Dari PKB tadi, ada nggak.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Saya kira sepakat dengan sebagian besar teman-teman *fraksi-fraksi*. Saya kira agenda ini ditutup dulu, karena kalau tidak akan menyelesaikan. Belum tentu Pak Menteri juga mungkin ada agenda lain dan beberapa

Kementerian Luar Negeri dan Hukum. Nah, saya kira bisa diatur waktu kembali.

Saya kira itu saja. Saya sepakat untuk ditutup dulu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Demokrat nggak ada ya. Tadi PAN.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M. Si.):

Pimpinan, Daeng Muhammad.

KETUA RAPAT:

Oh ya, PAN dulu. Silakan, PAN.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M. Si.):

Ya, makasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan.

Saya cuman ingin menggarisbawahi berkaitan persoalan impor beras. Sebetulnya kalau memang hari ini bukan agendanya, saya berharap ada agenda khusus yang harus kita bahas antara Menteri Perdagangan, Ka Bulog dengan Komisi VI.

Cuman saya tegaskan sekali lagi, saya paham betul bagaimana kondisi sekarang kaitan para petani kita. Karena, yang kita bicarakan adalah hajat hidup jutaan orang yang hidup dari sektor pertanian. Ini menjadi catatan, karena jujur saja saya mendengar Ka Bulog berbeda, Menteri Perdagangan berbeda, Menteri Pertanian berbeda. *Statement* yang berbeda-beda itulah sebetulnya mengindikasikan bahwa tidak ada sinkronisme koordinasi antar lembaga, antar lembaga kementerian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan kedaulatan pangan kita.

Jadi buat saya, kalau memang Mendag tetap ngotot dengan bahasa yang kemarin *statement* di media, jangan salahkan siapa pun, salahkan saya. Buat saya itu bukan solusi. Karena, sekarang Jawa Tengah panen raya, Jawa Barat mulai panen raya, bahkan bulan depan itu panen raya semua di Jawa Barat dan sekarang sudah dimulai dari mulai hari ini.

Nah, harapan saya ada pembahasan khusus. Jangan Pak, saya tahu betul hitung-hitungannya. Saya mengerti betul, karena saya pelaku pertanian. Saya petani yang tiap hari bergaul dengan mereka dan mengerti betul dengan mereka. Jujur saja, sekarang kondisi ketika isu impor itu dilakukan, harga padi ambruk di lapangan, harga beras ambruk. Itu risiko yang harus ditanggung dan itu kerugian bagi petani.

Satu sisi jujur saja, semangat presiden kita Bapak Joko Widodo untuk bicara kemandirian tentang pangan. Jangan pernah kalau bisa mampu dilakukan oleh kita sendiri, tidak perlu impor. Ini harus disemangati dan

didukung oleh semua para **menterinya** harusnya, bukan berbeda antara kebijakan presiden dengan apa yang dilakukan oleh **menterinya**.

Ini menjadi catatan saja, Pimpinan. Mudah-mudahan, saya minta ada agenda khusus berkaitan pembahasan mengenai impor yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan beserta Ka Bulog.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Ini, oke Gerindra, silakan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke, terima kasih Pak Haikal.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya rasa kalau kita mendengar aspirasi masyarakat dan juga aspirasi seluruh teman-teman kita sepakat **menteri** bahwa impor beras yang diisukan ini kan mengganggu. Karena, ini panen raya, lalu ada kondisi lainnya **di mana** juga ada PSBB yang menyebabkan dalam 5 tahun terakhir inilah puncak kita panen terbesar dalam 5 tahun terakhir.

Nah tapi kita, saya memahami juga keputusan Pak Menteri bicara impor beras itu bukan hanya keputusan Pak Menteri, tapi ini mungkin saja ini sidang kabinet terbatas. Tapi intinya apa, Pak Menteri pun saya mau mengapresiasi. Pak Menteri salah satu **menteri** yang berani di dalam kabinet Pak Joko ini, mengambil risiko dengan bertanggung jawab, itu penting. Karena, kita jarang mendengar pejabat publik ini berani bertanggung jawab ya, ini penting. Banyak orang yang *ngaku-ngaku* tidak bertanggung jawab, saya lupa, saya nggak tahu gitu. Nah, abang gua ini, Ketum HIPMI gue berani gitu loh. Nah, itu satu ya.

Yang kedua adalah soal impor garam juga ya. Impor garam Pak Menteri juga bukan kita bahas nanti, saya usulkan Pimpinan kita bahas, jangan sampai Mendag **di-bully** terus impor beras, impor garam. Impor garam ini kan bukan kewenangan Mendag, ada usulan dari **menteri** teknis terkait

Nah saya usulkan, kita rapat terbatas ya. Satu temanya impor beras ya, kita undang Mendag, kita undang Menteri Pertanian dan juga Dirut Bulog. Karena terus terang, ini sebelum Pak Menteri Pak Lutfi juga, Dirut Bulog yang lama yang sekarang pun juga terus berbeda data dengan Menteri Perdagangan yang lama. Jadi menurut saya, dalam masa sidang ke depan atau dalam waktu dekat ini, kita sebelum masa sidang ini berakhir, kita bisa agendakan undangan Mendag, undang Menteri Pertanian dan undang Dirut Bulog dalam rapat gabungan dengan Komisi IV supaya ini bisa selesai soal impor beras.

Impor garam juga kita undang yang namanya Menteri Perindustrian, lalu kita undang PT Garam, kita undang Mendag. Supaya urusan impor garam pun bisa selesai. Kasihan juga kalau tiba-tiba Menteri Perdagangan suruh

pasang padang sendirian. Padahal beliau hanya menjalankan rekomendasi-rekomendasi **menteri** teknis terkait

Jadi, itu ingin saya sampaikan, Pimpinan. Saya usulkan kita bikin agenda khusus ya yang lebih komprehensif, impor beras satu, yang kedua impor garam ya. Ya jadi, kita bikin agenda. Terakhir saya ucapkan terima kasih Pak Menteri atas kunjungan dari tim Kementerian Perdagangan ke Sumatera Barat sudah mau survei Pasar Raya di Padang dan juga pasar di Bukittinggi, terima kasih. Gerak cepat Kementerian Perdagangan kepada kami masyarakat Sumatera Barat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Ya, silakan Pak Awi.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Masuk barang itu.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M. Si.):

Ya, terima kasih Pimpinan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Lu kan sudah juga tadi, Bang.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M. Si.):

Jadi, kalau bicara apa yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan juga aspirasi dari masyarakat dengan isu yang berkembang, ya memang menyakitkan gitu. Tetapi, apakah forumnya ini tepat. Karena memang, forumnya ini adalah untuk pembahasan RUU. Kecuali, kecuali, forum ini hanya mendengarkan keluh kesah, tidak mengambil keputusan, tidak masalah kalau itu. Tetapi dengan catatan, hanya dengan Menteri Perdagangan. Yang lain-lain kan tidak ada urusan dengan Kemenkum HAM, terus siapa dari Menlu gitu.

Jadi lebih baik, kalau memang dilanjutkan mendengarkan masukan dari **anggota** yang dilanjutkan saja dengan Mendag atau diagendakan selanjutnya. Karena, forum ini juga tidak bisa mengambil keputusan.

Terima kasih ya.

KETUA RAPAT:

Ya, oke. Saya rasa secara umum semua meminta diagendakan khusus.

F-PDIP (ARIA BIMA, S.Sos.):

Pimpinan, sedikit menjembatani saja untuk mencari yang solutif bahasanya Bung Joko kan gitu.

KETUA RAPAT:

Ada Pak Ario Bimo tiba-tiba muncul. Iya, iya.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Diagendakan saja, Pimpinan.

F-PDIP (ARIA BIMA, S.Sos.):

Saya itu (*suara tidak jelas*) Andre dikunjungi Sumatera Barat. Saya bawa Ketua DPD Aceh sama Ketua Kadin dan Koni menyampaikan berbagai persoalan Aceh mengenai harga daging sampai harga gula yang melejit tinggi sampai sekarang nggak ada *follow up-nya* dari Pak Mendag. Tolong Pak Mendag itu diperhatikan itu Aceh. Saya bawa mereka karena akibat kunjungan Presiden, Pak. Saya WA, Pak Menteri juga nggak ada jawaban.

Intinya bahwa, intinya bahwa sepakat mengenai masalah perdagangan ini. *Leading sector* kita sebagai agen agregator dan artikulator dari rakyat mendengarkan dan saya kira Pak Menteri baru ini juga harus dilatih. Presidennya kan Presiden blusukan. Jadi, kupingnya juga harus blusukan ke kuping-kuping rakyat untuk bagaimana dalam hal ini memutuskan untuk ekspor dan impor itu tidak hanya memperhatikan harga ditingkatkan.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Suaranya nggak kedengaran.

F-PDIP (ARIA BIMA, S.Sos.):

Juga meningkatkan harga di tingkat produsen. Maka, silakan Komisi VI, Pimpinan dan Pimpinan Poksi, kapan kita akan bicara ini. Tidak hanya harga beras, harga kedelai, Pak Menteri, *nanngis* semua Pak pengrajin tempe sama pengrajin tahu. Saya telepon sama Pak Dirjen, nggak ngerti ini barang bebas.

Nah, mohon Pak Menteri. Saya berharap Komisi VI ini bisa melakukan pengawasan kinerja dengan *mitra* dan bagaimana kita bisa sepakati hari dan tanggal, karena waktunya *mepet*. Kalau sampai dengan persidangan ini kita nggak bisa memberikan narasi-narasi yang rasional, yang objektif yang memberikan pencerahan kepada rakyat. Saya kira tidak akan mendekatkan *legacy* yang baik buat Komisi VI. Nanti, kita ini dikira pegawainya pemerintah,

karyanya pemerintah, atasan dari pemerintah, kecuali kalau masyarakat belum gaduh.

Kepada Pak kita Pimpinan dan kawan-kawan, saya kira sudah baik. Karena, ini kita perlu jadwalkan hari yang khusus atau hari ini *monggo* saya *ngikut* saja, yang penting bahwa kita jangan terlalu memaksakan juga untuk hari ini. Tapi, kalau hari ini bisa. Karena, Pak Menteri ini sulit ya, Pak Menteri ini sulit untuk dijadwalkan rapat. Nggak tahu sulitnya karena apa, tapi saya.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M. Sc.):

Kok mati suaranya?

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Bimo.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Koneksi Telkom ini itu tuh.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Iya, dijadwalkan saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi intinya, ini kita jadwalkan khusus ya, Pak Menteri ya.

Baik, kalau begitu kita sampailah pada akhir rapat kita.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan, mungkin tidak sampai 1 menit.

Kita boleh membuat protokoler kapan kita rapat dengan berbagai argumentasi. Cuman di lapangan harga gabah itu menurun terus. Jadi, nggak bisa juga kita lama-lama menunggu ketidakpastian dari sikap pemerintah khususnya jadi apa, tidak impor ini. Jadi nggak bisa, jadi kita mau nunggu nih ada *kunker*, ada rapat yang lain, ada agenda yang lain.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya kira sikap pemerintah sudah jelas, Pimpinan. Impor beras tidak ada, tinggal Bulog bekerja. Serap itu padi petani bukan *ngoceh* di media saja Dirut Bulognya gitu loh.

KETUA RAPAT:

Porsinya Pak Menteri untuk menjawab, tapi kita tidak mewajibkan beliau menjawab di **rapat** ini.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Usul rapat masa sidang ini.

KETUA RAPAT:

Bapak ada *closing statement* atau langsung kita. Silakan, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya, saya ingin menjawab keresahan apa ada yang di masyarakat. Jadi Bapak, saya sekali lagi utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti ya dan ini semua tidak, tidak ada impor beras selagi panen raya ya, tidak ya.

Jadi, saya ingin supaya menenangkan semua. Yang ada hari ini Bapak, ada harga gabah petani itu turun bukan salah siapa-siapa, bukan salah Ka Bulog, bukan salah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sukses, karena hasil panen tahun ini menurut angka ramalan BPS adalah sama atau lebih baik sedikit dari pada tahun lalu. Permasalahannya hari ini, curah hujan yang tinggi menyebabkan gabah petani tidak bisa dijual ke Bulog karena basah. Ada harga minimal, ada kekeringan minimum dari Bulog untuk bisa membeli untuk cadangan beras pemerintah, itu jelas.

Nah, yang sekarang menjadi permasalahan pengering di tingkat petani itu tidak ada. Jadi, harganya begitu dipotong gabah itu musti segera digiling. Kalau tidak digiling, itu akan busuk.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jika itu persoalannya, apa urusannya dengan wacana impor beras, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN:

Gini, Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jika itu persoalannya.

MENTERI PERDAGANGAN:

Gini, gini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Dengan itu yang harus kita carikan.

KETUA RAPAT:

Pak, Pak Menteri selesaikan dulu *statement-nya*,

MENTERI PERDAGANGAN:

Jadi, Pak saya utarakan. Sebelum saya datang tanggal 23 Desember, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet. Jadi artinya, ini di tingkat lebih atas daripada Rakortas Menko, yaitu memutuskan bahwa Bulog untuk tahun 2021 itu musti mempunyai cadangan (*suara tidak jelas*) stok, salah satunya pengadaan 500.000 bisa dari impor. Sebelum saya datang.

Jadi waktu saya datang, saya hanya menghitung *jumlahnya*. Bapak, kalau kita lihat sekarang jumlahnya yang 500, jadi kan begini. 800.000 *dikurangin* sama berat beras tahun 2018, kalau beras 2018 itu antara 270 sampai 300.000, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500.000. Itu yang saya takutkan, karena dengan 500.000 itu pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga (*suara tidak jelas*). Kalau harganya naik, saya juga yang salah, Pak. Contoh, sekarang harga cabai. Karena hujan, harga cabai sekarang mendekati sebulan 90.000, siapa yang salah, saya juga. Jadi, padahal urusannya harga cabai naik, kenapa kok saya disalahkan juga. Jadi, ini tanggung jawab saya, saya bilang.

Sudah, kita nggak usah lebar, melebar daripada diskusinya. Saya janji tidak ada impor ketika panen raya. Selesai.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Mantap, mantap, setuju.

MENTERI PERDAGANGAN:

Yang menjadi permasalahan berikutnya, yang jadi permasalahan berikutnya Bapak dan Ibu supaya bapak dan ibu tahu. Bulog, *minggu* lalu hari Rabu atau hari Kamis, pengadaan untuk gabah petani itu hanya 85.000. Mustinya, mendekati 500.000 hari ini. Jadi, penyerapan itu tidak berjalan dengan baik. Ini menyebabkan stok Bulog pada saat yang paling rendah dalam sejarah, itu yang saya bilang.

Saya musti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mau keputusan kepada keputusan-keputusan yang tidak populer, saya *hadapin*, Pak. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, nggak ada masalah. Saya berhenti nggak ada masalah, Pak. Tapi, saya tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu dan contohnya sekarang harga cabai naik, apakah petani mendapatkan *support*? tidak. Salah siapa, salah saya juga. Bagaimana orang Indonesia mau makannya berasnya apa, cabainya cabai segar. Itu menjadi permasalahan.

Saya sama Pak Wamen bolak-balik mencoba supaya SRG di seluruh Indonesia yang bisa jalan, supaya harga petani itu bisa dipertahankan. Tapi Bapak, saya baru jadi **menteri** ini belum genap 3 bulan. Jadi, kalau saya musti memutar tangan untuk menyelesaikan semua masalah, tidak mungkin.

Tapi, percaya Bapak dan Ibu, saya bertanggung jawab dan saya mencoba untuk adil, untuk siapa, untuk Bapak dan Ibu dan seluruh rakyat Indonesia, pasti.

Itu Bapak Pimpinan, jadi saya ingin mengutarakan yang menjadi aspirasi rakyat itu, saya utarakan sekali lagi, ini bagian dari pada tanggung jawab saya.

Terima kasih, Bapak Pimpinan atas kerja samanya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Izin, Pimpinan 30 detik.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Enggak, enggak.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Nggak, izin usulan saja bukan membahas.

KETUA RAPAT:

Oke.

ANGGOTA KOMISI VI DPRRI:

Usulan saya karena ini soal yang sangat penting, supaya tidak menjadi polemik tanpa ujung pangkal. Saya kira harus kita agendakan waktu dengan Menteri Perdagangan, dengan Bulog ya, itu satu.

Yang kedua, saya mau ingatkan juga ini supaya kita sesama Anggota Dewan juga membaca Tatib dengan benar. Tidak pantas saya kira saling mengkritisi satu sama lain ya. Tolong disampaikan melalui Pimpinan gitu. Jangan aneh kita ini.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas masukannya semua dan tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Menteri Perindustrian, eh maaf, Menteri Perdagangan, kepada Wakil Menteri Perdagangan, kepada Wakil Menteri Luar Negeri dan Perwakilan daripada Kumham dan seluruh hadirin yang telah mengikuti rapat kita pada hari ini dan akhirnya kita ucapkan, "*Alhamdulillah*" rapat hari ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.21 WIB)

Jakarta, 22 MARET 2021

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Dewi Resmi, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001